



# EDUKASI KONSUMEN

EDISI MARET 2025

[sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)



**Pengawasan Koperasi di Sektor Jasa  
Keuangan dan Aset Kripto Resmi  
Beralih ke OJK**

# APPK

## Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen



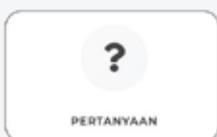
### Konsep Dasar APPK

APPK merupakan sebuah web-based portal yang dibangun oleh OJK, yang disediakan untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan pengaduan Konsumen dan penyelesaian sengketa. Portal ini ditujukan untuk mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

APPK dapat diakses melalui *link*:

 [kontak157.ojk.go.id](https://kontak157.ojk.go.id)

### Fitur utama sistem APPK



Penyampaian  
Pertanyaan



Penyampaian  
Informasi



Penyampaian  
Pengaduan

### Siapa saja yang dapat mengakses APPK?

Siapa pun yang menggunakan produk dan layanan di Sektor Jasa Keuangan (Konsumen perseorangan atau perusahaan)

Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diwakili oleh pihak yang sah (didukung surat kuasa, surat ahli)

### Hal penting yang perlu dipersiapkan untuk mengadu melalui APPK:

-  Gadget dan internet yang stabil
-  Identifikasi permasalahan
-  Dokumen Pendukung
-  Surat Kuasa
-  Persiapkan Data Pribadi

## 5 Kabar Otoritas

### OJK Luncurkan Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan

- 20 Edu Perbankan  
OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Rahasia Bank
- 22 Edu Invest  
OJK Dorong Pasar Modal Indonesia Berperan Lebih Aktif
- 24 Edu IKNB  
*Bullion Bank*, Alternatif Masyarakat Mengelola Emas
- 26 Edu Syariah  
OJK Gelar Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak Syariah) 2025
- 28 Edu Tech  
Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Layanan Sektor Jasa Keuangan
- 32 Sosok  
Dr. Damar Latri Setiawan, S.E., M.M., Direktur Utama (Dirut) PT Pegadaian Peran Pegadaian sebagai Salah Satu Bank Bulion Pertama di Indonesia
- 34 Regulasi  
OJK Terbitkan 9 Aturan Perkuat Lembaga Jasa Keuangan
- 36 Bisnis Pemula  
Penghasilan Tambahan Melalui Tren *Affiliate Marketing*
- 38 Investasi  
Strategi Investasi di Tahun Ular Kayu
- 40 Konsumen Bicara  
Konsumen Laporkan *Trading* Emas Ilegal
- 41 Telaah Produk  
Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Solusi Siapkan Jaminan Masa Tua
- 43 Angka Bicara  
*Outlook* Sektor Jasa Keuangan 2025
- 44 Inspirasi  
Kenapa UMKM Perlu Mengikuti Pameran/*Expo*?
- 46 Wacana  
Pentingnya Pencatatan Keuangan Sebagai Dasar Pengelolaan Keuangan
- 48 Literasi Keuanganpedia  
Pahami Pentingnya Asuransi Jiwa Lewat Film "1 Kakak 7 Ponakan"
- 49 Kuis Sikapi Uangmu
- 50 Silam Kini  
Rangkaian Sejarah Emas

## 10 Sorotan Utama II

### Peralihan Pengawasan Koperasi dari Kemenkop UKM ke OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini merambah pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro termasuk koperasi. Yang akan diawasi OJK adalah koperasi *open loop* atau koperasi yang melakukan transaksi keuangan.



## 18 Perspektif

### Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diprediksi akan meningkat tipis. Namun diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis.

## 6 Sorotan Utama I

### Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 Optimisme OJK pada Kinerja Sektor Jasa Keuangan

OJK kembali menggelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) tahun 2025. PTIJK tahun ini, OJK akan fokus pada penguatan sektor jasa keuangan (SJK) yang stabil dan inklusif untuk mendukung program prioritas nasional.

## 14 Sorotan Utama III

### Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengawasan Aset Kripto kepada OJK

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).



## 30 Fokus Global

### Pengaturan Regulasi Bagi *Financial Influencer* di Berbagai Negara

Meski terlihat menggairkan, profesi sebagai *financial influencer* yang cukup mendatangkan banyak cuan, ternyata bisa diganjar hukuman berat, lho. Apalagi jika tidak memiliki sertifikat atau tidak berizin, siap-siap diburu OJK.

## Tugas OJK Bertambah Lagi

**T**erhitung 12 Januari 2023, OJK disertai tugas mengawasi lembaga keuangan mikro termasuk koperasi. Khususnya OJK mengawasi koperasi *open loop* atau koperasi yang melakukan transaksi keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diundangkan pada 12 Januari 2023, kegiatan koperasi *open loop* diatur dan diawasi oleh OJK. Ke dalam koperasi *open loop* ini termasuk BPR koperasi, koperasi kripto, pinjaman *online* (pinjol), dan asuransi yang berbadan hukum koperasi.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, pada tahap awal-awal, OJK akan melakukan pengenalan, pembinaan, dan komunikasi persuasif kepada koperasi-koperasi *open loop*. "OJK perlu membina dan komunikasi yang baik dengan mereka. Sebagai sesuatu yang baru, OJK perlu membantu memberi pengetahuan kepada para koperasi *open loop* ini untuk memahami ketentuan yang ada, serta berkordinasi dengan kementerian terkait yang sebelumnya menangani," kata Agusman.

Sejalan dengan UU P2SK, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga telah mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada OJK dan Bank Indonesia (BI). Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan, beberapa waktu lalu.

Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK ini meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal. Proses transisi pengawasan aset kripto dari Bappebti Kemendag ke OJK ini akan rampung pada 2025 ini.

Dengan kewajiban menjalankan mandat yang semakin luas untuk mengatur dan mengawasi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (AKD-AK), instrumen derivatif keuangan dengan efek *underlying*, kegiatan usaha bulion (logam mulia dalam bentuk batangan atau koin), koperasi di SJK *open-loop*, serta Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) ini peran OJK semakin penting.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, dalam PTIJK 2025 menyatakan optimismenya bahwa kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut. Empat kebijakan prioritas OJK di 2025 untuk menjaga Sektor Jasa Keuangan tetap *resilient* diyakini mampu memberi daya ungkit yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi.

### SUSUNAN REDAKSI

#### DEWAN PELINDUNG:

Mahendra Siregar  
(Ketua Dewan Komisiner OJK)

#### DEWAN PENASEHAT:

Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen), Rizal Ramadhani (Deputi Komisiner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen)

#### PEMIMPIN UMUM /PEMIMPIN REDAKSI:

Mohammad Ismail Riyadi (Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah selaku Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi), Rudy Agus P. Raharjo (Kepala Departemen Pelindungan Konsumen)

#### REDAKTUR AHLI:

Cecep Setiawan (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Sekar Putih Djarot (Kepala Grup Komunikasi Publik); Sabar Wahyono (Direktur Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional), Tri Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen), Reli Ginting (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK), Arinengwang Gusta Galung Raharjo (Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan)

#### REDAKTUR:

Cecep Setiawan (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan)

#### REDAKSI:

Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

#### ALAMAT REDAKSI:

Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK  
Jl. Lap. Banteng Timur No. 2-4,  
Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar,  
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10710  
Telepon: (021) 29600000  
Faksimili: (021) 3866032  
Website: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada *minisite* OJK: [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)

# OJK Luncurkan Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan

**Demi meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya kelompok perempuan yang berperan penting dalam membangun masa depan bangsa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Ikatan Istri Pegawai OJK (IIPOJK) meluncurkan Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan.**

OJK bersama IIPOJK meluncurkan Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga, yang memiliki peran penting dalam mengelola ekonomi keluarga. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi keuangan bertema “Perempuan Cerdas Keuangan, Keluarga Sejahtera” yang diadakan di Kantor OJK, pada 14 Januari 2025.

Peluncuran Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan tersebut dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Dewan Pembina II POJK Ita Siregar.

Friderica menjelaskan bahwa perempuan, khususnya ibu, memegang dua peran krusial dalam keluarga, yaitu sebagai “menteri keuangan” dan “guru”. Sebagai “menteri keuangan”, ibu mengelola keuangan

keluarga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sedangkan sebagai “guru”, ibu berperan dalam mengajarkan pengelolaan keuangan kepada anak-anak untuk menciptakan generasi yang cerdas secara finansial. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keuangan.

Lanjutnya, peran penting perempuan dimaksud menjadikan peningkatan literasi dan inklusi keuangan perempuan sangat penting untuk dilakukan. Sehingga, dibutuhkan sinergi, komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Buku Saku Perempuan Cerdas

Keuangan dirancang sebagai panduan praktis yang mencakup berbagai materi edukasi keuangan, seperti cara membuat anggaran, mengelola tagihan, merencanakan tabungan, dan berinvestasi. Buku ini juga memberikan informasi tentang cara mencari pendanaan tambahan untuk usaha, serta mengelola pengeluaran keluarga. Ita Siregar, Ketua Dewan Pembina IIPOJK, menyatakan bahwa buku ini tidak hanya membantu perempuan dalam pengelolaan keuangan keluarga, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan di sektor jasa keuangan.

OJK berkomitmen untuk terus

meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan sebagai bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). OJK juga turut mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan memajukan perekonomian dan sektor jasa keuangan, serta memberantas penipuan dan praktik ilegal dalam dunia keuangan melalui Satgas PASTI dan Indonesia Anti Scam Centre (IASC).



Buku dapat dibaca melalui scan barcode berikut:





**Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025**

# **Optimisme OJK pada Kinerja Sektor Jasa Keuangan**

OJK kembali menggelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) tahun 2025. PTIJK tahun ini, OJK fokus pada penguatan sektor jasa keuangan (SJK) yang stabil dan inklusif untuk mendukung program prioritas nasional.

**P**TIJK 2025 merupakan wadah penyampaian perkembangan terkini dan arah kebijakan OJK kepada industri jasa keuangan (IJK) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja OJK kepada publik. PTIJK tahun ini, OJK menyatakan optimistis kinerja sektor jasa keuangan di 2025 akan tetap

positif sejalan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil.

“Kami optimis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam PTIJK 2025 yang digelar di Jakarta dan dihadiri ratusan pelaku industri jasa keuangan, serta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga.

Dalam laporan pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK), Mahendra menjelaskan empat kebijakan prioritas OJK di 2025 untuk menjaga SJK agar tetap *resilient* sehingga mampu memberikan daya ungkit yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi kontribusi SJK dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah.

OJK juga mengarahkan IJK agar mengambil peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain melalui perluasan pembiayaan bagi program prioritas nasional yang juga menjadi bagian dari strategi bisnis IJK seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, pengembangan bidang kesehatan dan pendidikan, serta program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Program prioritas nasional berikutnya yakni pengembangan SJK untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Tahun ini menjadi tahun perdana bagi OJK untuk melaksanakan amanat Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sehingga OJK wajib menjalankan mandat yang semakin luas untuk mengatur dan mengawasi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (AKD-AK), instrumen derivatif keuangan dengan efek *underlying*, kegiatan usaha bulion

(logam mulia dalam bentuk batangan atau koin), koperasi *open-loop*, serta Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK).

Sehubungan dengan penerapan mandat tersebut, OJK menyelenggarakan seminar dengan tiga pembahasan yakni “*Bullion Financial Services in Indonesia: Opportunities and Challenges*” (kegiatan bulion); “*Unlocking Potential Financial Derivatives Development*” (pengawasan keuangan derivatif); dan “*Harnessing Digital Assets for Financial Market Growth and Enhanced Financial Inclusion*” (aset kripto).

Dalam laporan PTIJK, OJK juga melakukan pendalaman pasar keuangan melalui pengembangan arsitektur ekosistem *Credit Reporting System* (CRS) yang lebih luas termasuk pengembangan instrumen di pasar

*Management and Scenario Analysis* (CRMS) bagi perbankan.

OJK juga melakukan penyempurnaan ekosistem penegakan integritas di SJK. Karena itulah tahun ini OJK meluncurkan Indonesia *Anti Scam Center* (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) dan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Keuangan (SIPELAKU) sebagai upaya OJK untuk melindungi masyarakat. Ke depannya, penanganan *scam* juga akan diperkuat dengan rencana pembentukan *Global Anti-Scam Alliance* (GASA) Indonesia *Chapter*.

#### **Perkembangan Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK)**

Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, Bursa Karbon di Indonesia terus berkembang. Hingga 31 Januari 2025, sebanyak 107 perusahaan telah

“ Kami optimis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut, kata Mahendra Siregar.

modal; peningkatan peran industri keuangan syariah; dan pelaksanaan program-program peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperluas basis investor dan konsumen, antara lain GENCARKAN, TPAKD, dan GERAK Syariah.

Pemaparan selanjutnya adalah konsistensi OJK dalam mendukung pencapaian komitmen *net zero emission* Indonesia melalui penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2; penerbitan *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan untuk melengkapi ekosistem bursa karbon; serta menindaklanjuti terbitnya *Climate Risk*

berpartisipasi dengan total transaksi karbon mencapai 1,18 juta ton CO<sub>2</sub>e dan nilai akumulasi sebesar Rp62,93 miliar. Sebagian besar transaksi terjadi di Pasar Negosiasi, diikuti oleh Pasar Lelang dan Pasar Reguler. Dengan lebih dari 4.000 pendaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, potensi Bursa Karbon di Indonesia masih sangat besar. Untuk memperluas dampaknya, mulai Januari 2025 Bursa Karbon membuka perdagangan internasional dengan transaksi luar negeri mencapai 49.815 ton CO<sub>2</sub>e senilai Rp4,02 miliar.

Untuk menegakkan peraturan pasar modal, OJK menjatuhkan denda



Rp4,3 miliar kepada satu pihak yang melanggar aturan perdagangan saham pada Januari 2025. Sepanjang 2024, OJK juga memberi sanksi denda keterlambatan laporan kepada 30 pelaku pasar modal, serta 18 peringatan tertulis.

#### **Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)**

Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada Desember 2024, pertumbuhan kredit tetap *double digit* sebesar 10,39% yoy menjadi Rp7.827 triliun.

Secara umum, tingkat profitabilitas bank sebesar 2,69%, menunjukkan kinerja industri perbankan tetap *resilient* dan stabil. OJK juga telah berdiskusi dan berbagi informasi dengan industri perbankan mengenai upaya penguatan industri perbankan dalam upaya deteksi awal rekening

terindikasi judi *online*, di samping terus menguatkan upaya pengawasan terhadap pemanfaatan rekening non-aktif sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.

#### **Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP)**

Industri asuransi di Indonesia terus berkembang. Pada Desember 2024, total aset asuransi mencapai Rp1.133,87 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Pendapatan premi juga naik, terutama dari asuransi jiwa. Keuangan perusahaan asuransi secara umum sehat, dengan modal yang kuat.

Dana pensiun juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan total aset mencapai Rp1.508,21 triliun. Baik program pensiun sukarela maupun wajib mengalami peningkatan. Sementara itu, perusahaan penjaminan mengalami sedikit penurunan aset.

OJK terus berupaya memperkuat sektor ini dengan menerbitkan berbagai peraturan baru dan mengawasi perusahaan-perusahaan agar mematuhi aturan. OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk memiliki aktuaris, yaitu ahli yang menghitung risiko keuangan.

#### **Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)**

Sampai dengan Desember 2024, perusahaan pembiayaan mengalami pertumbuhan piutang sebesar 6,92%, terutama didukung oleh pembiayaan investasi. Risiko kredit macet terjaga dengan baik. Namun, pembiayaan modal ventura mengalami penurunan sebesar 8,65%.

Layanan pinjaman *online* atau *fintech P2P lending* tumbuh mencapai 29,14%, meskipun risiko kredit macet sedikit meningkat. Layanan “beli sekarang bayar nanti” (BNPL) juga mengalami pertumbuhan yang signifikan.

OJK telah mencabut izin usaha dua perusahaan modal ventura yang

”

Tahun ini menjadi tahun perdana bagi OJK untuk melaksanakan amanat Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

tidak memenuhi persyaratan modal. Beberapa perusahaan pembiayaan dan pinjaman *online* juga belum memenuhi ketentuan modal minimum. OJK terus mengawasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan.

### **Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK)**

Terhitung sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Januari 2025, OJK telah menyelenggarakan 5.487 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 7.319.671 peserta di seluruh Indonesia. Platform digital Sikapi Uangmu, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui *minisite* dan aplikasi, telah menerbitkan 458 konten edukasi, dengan total 1.874.645 viewers. Selain itu, terdapat 80.963

pengguna *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU), dengan total akses modul sebanyak 104.250 kali dan penerbitan 82.744 sertifikat kelulusan modul.

Upaya peningkatan literasi keuangan tersebut didukung oleh penguatan program inklusi keuangan melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). OJK bersama Kementerian Dalam Negeri dan *stakeholders* terkait telah berhasil mendorong pembentukan TPAKD secara penuh di seluruh provinsi (38 Provinsi) dan kabupaten/kota (514 kab/kota) di Indonesia.

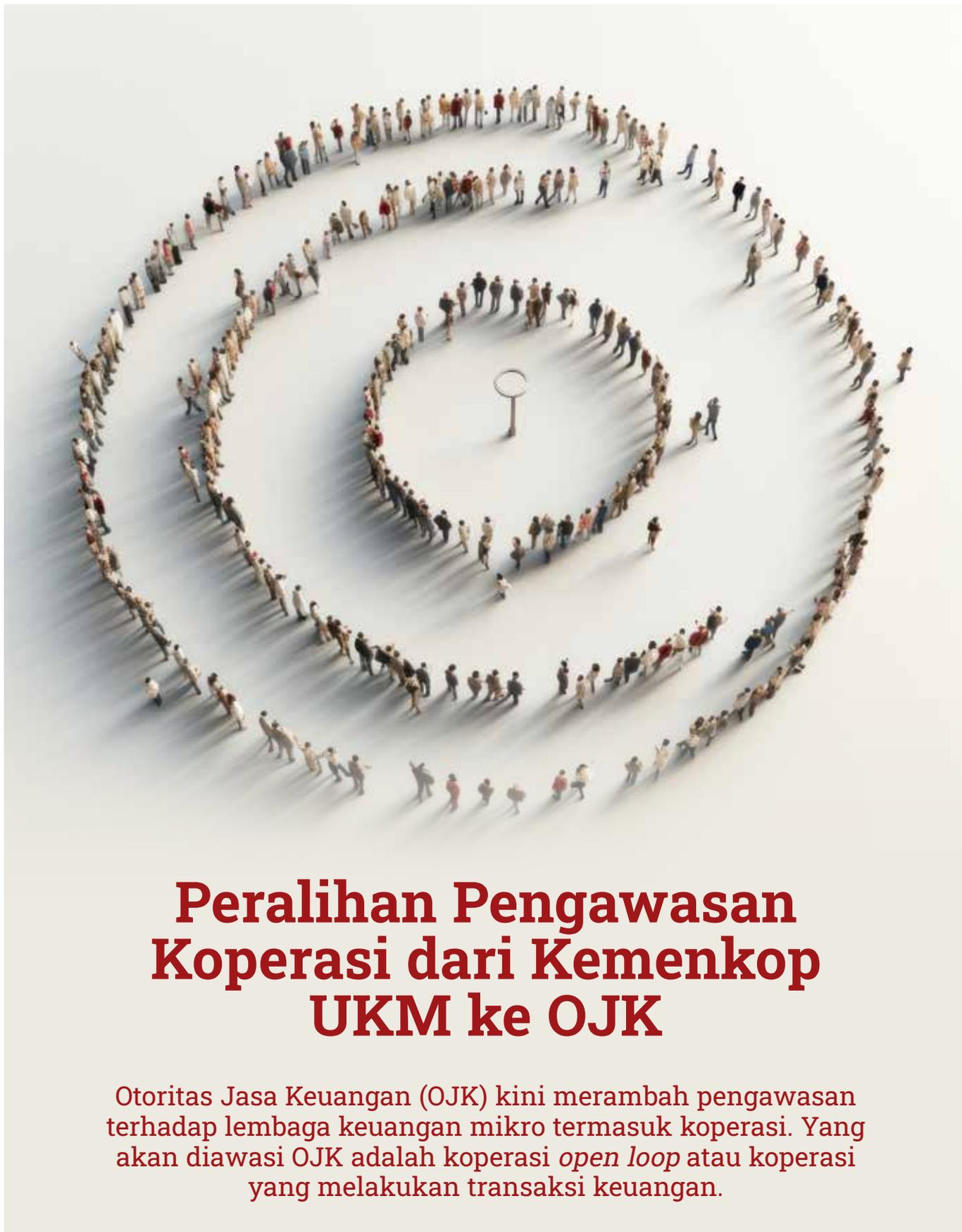
### **Perkembangan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD)**

OJK terus mengembangkan layanan keuangan digital. Hingga

Januari 2025, 17 perusahaan inovasi teknologi keuangan yang telah terdaftar membantu menghubungkan masyarakat dengan lembaga keuangan. OJK juga sedang memproses pendaftaran 23 perusahaan lainnya.

Pengawasan aset kripto kini beralih ke OJK. Transisi ini dilakukan bertahap, dengan fokus pada stabilisasi, pengembangan, dan penguatan industri. Saat ini, OJK telah menerbitkan peraturan baru dan menyetujui izin untuk 19 entitas aset kripto. Jumlah pengguna aset kripto di Indonesia terus meningkat, mencapai 22,91 juta pada Desember 2024. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aset kripto, OJK akan mengadakan Bulan Literasi Kripto 2025, serta bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memperkuat regulasi dan inovasi keuangan digital.





## **Peralihan Pengawasan Koperasi dari Kemenkop UKM ke OJK**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini merambah pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro termasuk koperasi. Yang akan diawasi OJK adalah koperasi *open loop* atau koperasi yang melakukan transaksi keuangan.

**P**emerintah tengah melakukan penataan ulang koperasi guna mencegah berkembangnya praktik *shadow banking* yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Diduga banyak koperasi simpan pinjam (KSP) yang melakukan praktik *shadow banking*. Sampai saat ini pun masih banyak KSP di Indonesia yang berlindung di balik filosofi ‘jati diri koperasi’ yang menolak pengawasan di bawah OJK.

Untuk itu, seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pengaturan dan pengawasan KSP akan ditata ulang. Keberadaan UU P2SK tersebut semakin memperjelas pengawasan usaha koperasi, dimana pengawasan usaha koperasi akan terbagi menjadi *open loop* dan *close loop*.

Koperasi *close loop* merupakan koperasi simpan pinjam murni. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi sejatinya hanya dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan; koperasi lain dan/atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Pengaturan, perizinan, dan pengawasan koperasi *close loop* sepenuhnya akan tetap berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Sementara itu, koperasi *open loop* atau koperasi yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan akan diatur dan diawasi oleh OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru diundangkan pada 12 Januari 2023.

Berdasarkan Pasal 202 UU P2SK, koperasi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan merupakan koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan;
- b. Menghimpun dana dari anggota koperasi lain;
- c. Menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain;
- d. Menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
- e. Melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

Setelah UU P2SK disahkan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dalam hal ini Kemenkop UKM, harus melakukan penilaian sesuai kriteria.

UU P2SK sendiri memandatkan penilaian oleh Kemenkop UKM harus diselesaikan paling lambat 2 tahun, dihitung sejak UU RUU P2SK disahkan. Kemudian koperasi yang dimaksud dalam undang-undang ini wajib

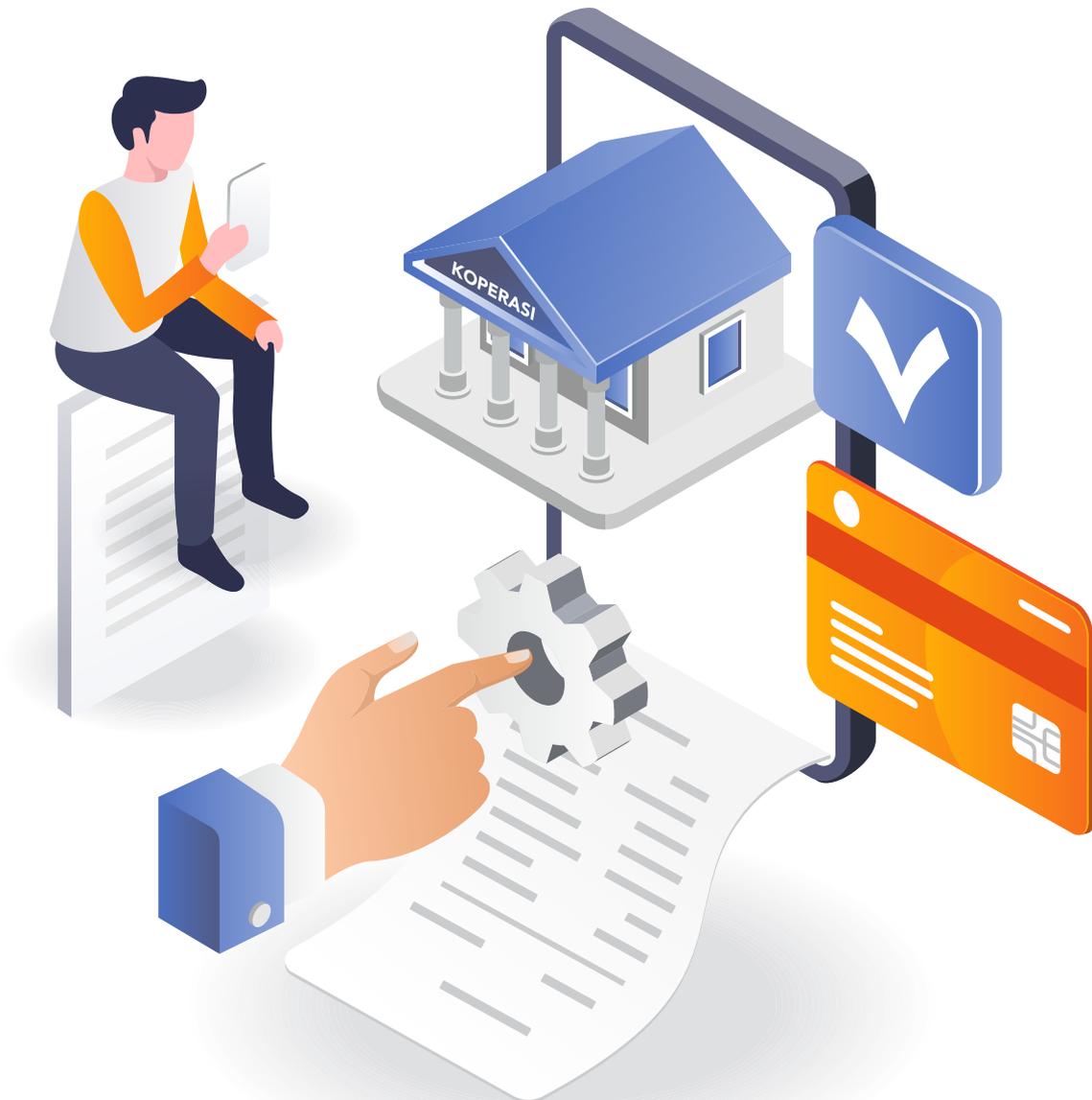
melaporkan kegiatan usahanya kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

Sesuai dengan Pasal 324 huruf e UU P2SK yang berbunyi “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi menyerahkan daftar koperasi ini kepada OJK untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang mengenai sektor jasa keuangan”, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dapat dibantu oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

“

Di masa-masa awal, kita perlu melakukan pembinaan dan komunikasi yang baik dengan mereka. Karena ini sesuatu yang baru bagi mereka, kita harus bantu memberi pengetahuan kepada mereka, memahami ketentuan yang ada, serta berkordinasi dengan kementerian terkait yang sebelumnya menangani.

”



### **OJK Terima Daftar Koperasi Jasa Keuangan dari Kemenkop**

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop), Budi Arie Setiadi, menyerahkan daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar di Kantor Kemenkop.

Daftar koperasi tersebut diserahkan Budi Arie Setiadi kepada Mahendra Siregar didampingi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.

Sementara itu, Mahendra Siregar dalam kesempatan

tersebut mengatakan segera akan memproses daftar koperasi *open loop* yang telah diserahkan Kementerian Koperasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

"Tentu kami sesuai dengan peraturan OJK yang sudah diterbitkan berkaitan dengan itu akan memprosesnya lebih lanjut mulai dari perizinan dan tentu pada gilirannya nanti pengaturan dan pengawasannya dan upaya untuk pengembangannya tentu saja. Karena esensi dari UU P2SK adalah pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan," katanya.

Mahendra juga menawarkan kerja sama pendampingan dan pembinaan terhadap koperasi di Indonesia termasuk di bidang pengawasan dan penguatan governansi. Hal itu, sambungnya, sangat diperlukan karena pada akhirnya

kekuatan dari perekonomian kita adalah pada entitas, apakah itu perusahaan, apakah itu koperasi, apakah itu badan hukum lain yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam surat Menteri Koperasi RI Nomor B-3/M.KOP/ PK.02.00/2025 tanggal 10 Januari 2025, telah disampaikan daftar koperasi *open loop* yang merupakan hasil penilaian Kemenkop sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 UU P2SK. Selanjutnya koperasi yang tercantum dalam daftar tersebut akan ditindaklanjuti oleh OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

OJK akan melakukan sosialisasi dan komunikasi publik terkait proses tindak lanjut terhadap koperasi *open loop*

tersebut dalam rangka pengembangan dan penguatan sesuai dengan UU P2SK.

Selain itu, OJK akan terus melakukan koordinasi dengan Kemenkop dan Dinas Koperasi di daerah untuk memastikan seluruh proses tindak lanjut, termasuk perizinan kepada OJK dapat berlangsung dengan baik.

### **Koperasi di Bawah Pengawasan OJK**

Agusman menjabarkan lingkup penugasan yang akan diberikan kepadanya. “Di sini sangat jelas yang akan diawasi OJK adalah koperasi *open loop* atau koperasi yang melakukan transaksi keuangan,” ujarnya.

Koperasi *open loop* seperti BPR koperasi atau asuransi yang berbadan hukum koperasi diawasi oleh OJK. Perbedaan koperasi *open loop* dengan *close loop* adalah koperasi *open loop* memungkinkan modal mayoritas berasal dari pihak yang bukan anggota koperasi, sedangkan modal koperasi *close loop* sebagian besar harus berasal dari para anggota.

OJK hanya akan mengatur koperasi yang bersifat *open loop*. Koperasi *close loop* yang berupa koperasi simpan pinjam pengawasannya tetap berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Dengan masuknya koperasi ke dalam RUU P2SK, maka koperasi dimungkinkan dapat merambah ke entitas usaha lain di sektor jasa keuangan, misalnya asuransi, kripto, perbankan dan lainnya.

Agusman menambahkan, di awal-awal, pihaknya akan melakukan pengenalan, pembinaan, dan komunikasi yang baik dengan koperasi-koperasi *open loop*. Mengingat aturan tersebut adalah hal baru, Agusman memastikan OJK akan melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif. “Di masa-masa awal, kita perlu melakukan pembinaan dan komunikasi yang baik dengan mereka. Karena ini sesuatu yang baru bagi mereka, kita harus bantu memberi pengetahuan kepada mereka, memahami ketentuan yang ada, serta berkordinasi dengan kementerian terkait yang sebelumnya menangani,” kata Agusman. Selain itu juga, pihaknya memastikan, aturan tersebut dapat mendukung *market conduct* dan perlindungan konsumen.

“

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi menyerahkan daftar koperasi ini kepada OJK untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

”

# Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengawasan Aset Kripto kepada OJK



Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

**K**ementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto (AKD AK) serta derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pengalihan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di kantor Kementerian Perdagangan.

Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital termasuk

Aset Kripto (AKD AK) serta derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan *underlying* yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Transisi pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK masih berlangsung.

pelaku pasar maupun pelaku ekonomi.

#### **Amanat UU P2SK**

Pengalihan tugas dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

pengawasan, penyelenggaraan diskusi pengembangan pengawasan, serta peningkatan literasi kepada masyarakat. Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait di antaranya kementerian/lembaga, industri, dan para penyelenggara.

Selain menerima peralihan tugas AKD AK, OJK juga akan menerima



Hal ini selaras dengan target agar proses transisi ini rampung 2025.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Kemendag terus mendukung agar transisi pengalihan dapat berlangsung secara transparan dan memberikan keamanan bagi

Keuangan (UU P2SK). Hal ini juga menjadi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan AKD AK serta Derivatif Keuangan.

Dalam proses persiapan pengalihan pengaturan, Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia juga saling berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur

peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif keuangan dengan *underlying* efek yang di antaranya indeks saham dan saham tunggal asing. Pengalihan tersebut bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, dan regulasi setara (*same activity, same risk, same regulation*).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan,

peralihan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan terintegrasi. Sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen sehingga dapat memberikan implikasi positif bagi pengembangan industri di sektor keuangan.

Untuk menghindari gejolak di pasar, OJK telah menerbitkan kerangka peraturan, yakni POJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto serta SEOJK No. 20 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaporan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Sedangkan terkait derivatif keuangan, OJK menerbitkan POJK No. 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek.

Aturan itu sepenuhnya dilaksanakan berbekal dari prinsip-prinsip dan pelaksanaan pengaturan pengawasan yang ada di Bappebti selama ini. "Sudah ada diskusi dan proses kerja sama untuk persiapan transisi itu. Jadi dalam hal itu sebenarnya kita mengharapkan proses transisinya akan berjalan mulus, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik dan ketidakpastian," kata Mahendra.

Di sisi infrastruktur, perizinan OJK telah siap dengan sistem perizinan AKD AK dan derivatif keuangan secara digital melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi atau SPRINT.

Senada, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya mengatakan, PP transisi pengawasan kripto telah ditandatangani. Langkah selanjutnya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Bappebti dengan OJK.

Tirta menjelaskan, dalam nota kesepahaman itu nanti akan dituangkan proses untuk peralihan, utamanya terkait tahapan perizinan akan seperti apa. Kemudian juga penanggung jawab dari perizinan tersebut juga akan ditetapkan di dalamnya.

Sedangkan menyangkut sumber daya manusia (SDM) sudah disiapkan melalui Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) OJK. Diperkirakan proses transisi ini bisa rampung kuartal I-2025.

### **Perkembangan Nilai Transaksi PBK dan Perdagangan Fisik Aset Kripto**

Pada periode Januari-November 2024, nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) berdasarkan *Notional Value* tercatat sebesar Rp30.503 triliun. Nilai ini naik 30,20% dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang tercatat sebesar Rp23.428 triliun.



Khusus November 2024, jumlah nasabah yang aktif bertransaksi pada PBK tercatat sebanyak 70.676 Nasabah. Jumlah ini naik 53,93% dari periode November 2023 yang tercatat 45.915 nasabah.

Saat ini, transaksi PUVA difasilitasi 2 bursa berjangka, 2 Lembaga Kliring Berjangka, 55 Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), 21 Pedagang Penyelenggara SPA, 8 Penasihat Berjangka, dan 15 Bank Penyimpan Margin. Selain itu, terdapat 253 Kontrak Derivatif SPA untuk PUVA yang ditransaksikan pada 2 Bursa Berjangka.

Sementara, transaksi aset kripto di Indonesia pada periode Januari-November 2024 tercatat sebesar Rp556,53 triliun. Nilai ini melonjak 356,16% dibanding periode yang sama pada 2023 yang tercatat sebesar Rp122 triliun (yoy).

Sementara, pelanggan aset kripto yang terdaftar secara akumulatif sejak Februari 2021-November 2024 tercatat sebanyak 22,11 juta pelanggan. Di sisi lain, sampai saat ini jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang telah berizin Bappebti tercatat sebanyak 16 pedagang. Selain itu, terdapat 14 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) sedang berproses menjadi PFAK.

### **OJK Jamin Keamanan Industri Kripto**

OJK menegaskan komitmennya dalam mengawasi industri aset kripto guna memastikan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, serta transparansi dalam ekosistem aset keuangan digital.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan



Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Djoko Kurnijanto mengungkapkan, OJK menerapkan pendekatan berbasis prinsip (*principle-based regulation*) yang menyeimbangkan antara penguatan regulasi dan dukungan terhadap inovasi. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan perlindungan konsumen dalam menjaga kepercayaan publik.

OJK pun turut serta dalam dalam program tahunan Bulan Literasi Kripto (BLK) yang diselenggarakan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo). *Event* ini merupakan bagian dari komitmen industri dalam meningkatkan edukasi aset digital, yakni meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aset kripto dan teknologi *blockchain* di Indonesia.

Data menunjukkan tingkat literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, dengan literasi keuangan umum sebesar 65%, literasi

keuangan digital sekitar 45%, dan pemahaman global terhadap aset kripto hanya 31,8%. Maka, pentingnya riset mandiri sebelum melakukan investasi dalam aset kripto.

Direktur Pengawasan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Uli Agustina menegaskan pihaknya memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai regulator dan sebagai pengawas *market conduct* untuk perlindungan konsumen. "Kami tidak hanya melakukan pengawasan pasca kejadian, tetapi juga menitik beratkan pada literasi dan edukasi melalui program seperti Bulan Literasi Kripto, Bulan *Fintech*, dan berbagai inisiatif digital lainnya," jelasnya.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan keamanan, OJK dan asosiasi terus mendukung berbagai program literasi keuangan, termasuk edukasi publik mengenai investasi aset kripto yang aman dan terverifikasi.



target 2024 yang sama-sama sebesar 5,2%. Hanya saja, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2024 pertumbuhan ekonomi secara kumulatif dari Januari - Desember 2024 sebesar 5,03%.

*Institute*

*for Development of Economics and Finance (Indef) juga mencatat selama sepuluh tahun ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata-rata 5%. Tren melandainya pertumbuhan ekonomi juga terlihat dari capaian tahun lalu.*

Ada beberapa faktor yang memperberat laju pertumbuhan ekonomi 2025. Berdasarkan catatan *Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia*, stabilitas perekonomian dunia masih akan terganggu. Terutama setelah Donald Trump memenangkan pemilihan umum presiden Amerika Serikat pada November 2024. Rencana Trump memperketat tarif itu dianggap akan memicu ketegangan dan memengaruhi rantai pasok global.

CORE Indonesia juga menilai penurunan harga-harga komoditas juga

## Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diprediksi akan meningkat tipis. Namun diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis.

**I**MF, Bank Dunia, OECD, hingga PBB telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025. Lembaga-lembaga internasional tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5%.

Pemerintah sendiri sudah memasang target memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2025, seperti yang ditetapkan dalam UU APBN 2025.

Target tersebut tidak berbeda dari

dapat berdampak bagi perekonomian beberapa negara. Khususnya bagi Indonesia yang bergantung pada komoditas primer. Hal ini terlihat dari pelambatan penerimaan pajak.

Dari sisi domestik, Indonesia masih mengalami pelambatan konsumsi. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 55% dari produk domestik bruto (PDB). Masalah terbesarnya adalah terjadi pelemahan konsumsi kelas menengah dan calon kelas menengah, kelompok yang menjadi kontributor utama konsumsi, dan pelambatan ini masih akan berlanjut tahun ini.

Untuk mendukung laju pertumbuhan 2025, investasi juga perlu ditingkatkan dibanding tahun sebelumnya. Namun transisi pemerintahan menyebabkan target peningkatan investasi masih menghadapi tantangan. Pada 100 hari awal masa pemerintahan memang tim belum terlalu solid. Pemerintah masih fokus pada konsolidasi internal karena banyaknya kementerian dan lembaga baru. Kebijakan-kebijakan yang kaitannya mendorong investasi masih belum efektif paling tidak sampai paruh pertama 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono mengungkapkan realisasi target pertumbuhan 2025 akan sangat bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Adapun, saat ini pemerintah juga tengah mendalami sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak terbatas pada hilirisasi. Namun, pada pendalaman dari hilirisasi tersebut untuk berbagai sumber daya alam lainnya. Selain itu, Tommy mendorong adanya investasi-investasi baru di sektor-sektor selain pertambangan untuk mendorong konsumsi, dimana konsumsi rumah

tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

Indonesia juga harus mengoptimalkan berbagai kebijakan fiskal yang telah diputuskan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Anggaran sekurang-kurangnya Rp71 triliun yang digelontorkan pemerintah harapannya dapat menghadirkan dampak berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian secara nasional. Program ini diproyeksi akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,1%. Namun, optimisme itu hanya akan tercapai jika program MBG benar-benar melibatkan warga dan UMKM lokal sebagai penyedia makanan atau unit dapur umum yang

menyuplai makan bergizi tersebut. Tak hanya itu, akan banyak tenaga kerja diprediksi terserap dengan adanya program tersebut.

Selain MBG, program pembangunan tiga juta rumah yang diinisiasi pemerintahan baru pun diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang besar. Apalagi, perumahan menjadi salah satu sektor dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terbilang besar.

Di balik itu semua, pemerintah juga tetap harus berupaya untuk menarik investasi, terutama dari luar negeri. Hal ini guna membuka lapangan kerja yang lebih luas. Pemerintah juga harus berupaya untuk memastikan bahwa angka korupsi dapat ditekan agar ekonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai semua target yang telah ditetapkan.





# OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Rahasia Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank. Tujuan penerbitan POJK ini adalah untuk memperbarui ketentuan terkait dengan rahasia bank yang diterbitkan lebih dari dua dekade yang lalu.

**S**everapa amankah informasi keuangan nasabah di bank? Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru yang mengatur tentang “Rahasia Bank”. Aturan ini dibuat untuk melindungi informasi keuangan, para nasabah, sekaligus memperjelas kapan informasi tersebut boleh dibuka.

Rahasia Bank adalah segala informasi tentang keuangan nasabah yang disimpan oleh bank, termasuk saldo tabungan, riwayat transaksi, dan informasi investasi nasabah. Aturan baru ini, yang disebut Peraturan OJK Nomor 44 Tahun 2024 (POJK

44/2024), memperbarui aturan lama agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Penerbitan POJK ini merupakan amanat dari UU P2SK untuk mengatur rahasia bank lebih lanjut.

Ketentuan rahasia bank sebelumnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Penerbitan POJK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders*, baik pihak yang meminta Rahasia Bank, yang antara lain adalah aparat penegak hukum, maupun industri perbankan yang akan memberikan Rahasia Bank kepada pihak yang meminta dan memenuhi persyaratan pembukaan Rahasia Bank.

POJK rahasia bank mengatur antara lain pertama penyesuaian definisi rahasia bank agar selaras dengan UU P2SK, sebelumnya menggunakan terminologi “segala sesuatu” yang disesuaikan dengan terminologi “informasi”. Selain itu terdapat terminologi baru yaitu “Nasabah Investor dan Investasinya” yang belum tercakup pada definisi rahasia bank dalam PBI rahasia bank.

Kedua, hal-hal yang dapat dikecualikan dari rahasia bank agar selaras dengan UU P2SK. Adapun 13 hal yang dikecualikan dari Rahasia Bank di antaranya:

1. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabah, Nasabah dan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah;
2. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
3. Permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator

yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta;

4. Permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan dan/atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis;
5. Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dan/ atau Nasabah Investor yang telah meninggal dunia;
6. Tukar menukar informasi antar-Bank;
7. Memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
8. Permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam undang-undang;
10. Kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia;
11. Kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan Simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
12. Pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal; dan
13. Penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Ketiga, kewajiban bank dan atau pihak terafiliasi untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan atau nasabah investor dan investasinya, kewajiban bank dalam memiliki prosedur internal

mengenai pembukaan rahasia bank, serta pendokumentasian yang perlu dilakukan bank atas seluruh permintaan dan pemberian pembukaan informasi rahasia bank.

Keempat, mekanisme pembukaan rahasia bank yang melalui OJK maupun yang diajukan langsung kepada bank yang dalam PBI rahasia bank belum terdapat mekanisme pembukaan rahasia bank yang diajukan langsung kepada bank yang diantaranya, diatur batasan tujuan serta mekanisme umum terkait dengan pelaksanaan tukar menukar informasi antar-bank.

Kelima, pencabutan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 27 Desember 2024.

OJK akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi POJK ini untuk memastikan peraturan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak.

Jika ada yang ingin memahami aturan ini lebih dalam, OJK menyediakan aplikasi SIKEPO. Aplikasi ini bisa diakses melalui situs [sikepo.ojk.go.id](https://sikepo.ojk.go.id) atau diunduh melalui *Google Playstore* dan *App Store*.

Secara keseluruhan, POJK 44/2024 hadir untuk memperbarui dan menyesuaikan aturan terkait rahasia bank agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Dengan adanya aturan ini, diharapkan bank dapat menjaga kepercayaan nasabah sambil tetap memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak berwenang secara sah.

# OJK Dorong Pasar Modal Indonesia Berperan Lebih Aktif



**P**emerintah berkomitmen mendukung kinerja pasar modal Indonesia tetap positif di 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Kolaborasi pemerintah dengan ekosistem pasar modal menjadi strategi untuk mendukung perekonomian di tengah tantangan ekonomi ke depan.

Setelah melalui 2024 yang menantang dengan tahun politik yang menguras anggaran pemerintah, dampak perubahan iklim, dan beragam peristiwa ekonomi global, pemerintah mengharapkan perbaikan kinerja

Dalam rangka mendukung berbagai program strategis pemerintah dan target pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai program yang telah disiapkan. OJK dorong peran pasar modal untuk lebih aktif tahun 2025 ini.

ekonomi di awal tahun 2025, terutama dari dalam negeri.

Pasar modal Indonesia menunjukkan performa positif di awal tahun 2025 dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp12,3 triliun

sepanjang bulan Januari. Angka ini mencakup dana yang diperoleh dari pencatatan saham, penerbitan obligasi, serta potensi pendanaan lainnya. Selain itu, sektor obligasi juga menunjukkan hasil yang signifikan

dengan penerbitan 8 emisi obligasi yang berhasil menarik dana sebesar Rp8,6 triliun.

Performa pasar modal yang baik tersebut memang diharapkan untuk mendukung program strategis pemerintah. Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, berbagai program pasar modal Indonesia difokuskan pada penguatan dan pengembangan pasar modal salah satunya melalui peningkatan pendalaman pasar yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat.

Selain itu, pasar modal juga akan melakukan penguatan regulasi dan sistem dalam proses penawaran umum agar lebih efisien dan transparan. Program lainnya yang telah disiapkan adalah pengembangan produk, infrastruktur dan layanan baru. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal.

Menurut Mahendra, pasar modal Indonesia juga akan mengembangkan produk baru dan optimalisasi pemanfaatan produk pasar modal eksisting termasuk bursa karbon dan produk yang berwawasan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta pengembangan infrastruktur beserta layanan transaksi efek.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya di Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2025, mengatakan pemerintah akan mendukung upaya pengembangan dan penguatan pasar modal Indonesia, seperti program untuk pendalaman pasar melalui edukasi dan peningkatan literasi masyarakat. "Jual beli saham sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi tapi bahkan di tingkat sekolah dasar sehingga mereka lebih kenal dengan bursa efek," kata Menkeu.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan dukungan pemerintah untuk pasar modal Indonesia diantaranya melalui penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor

keuangan dan penyelesaian produk turunan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan implementasi pajak karbon serta regulasi batas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.

"Kami akan bekerja sama dengan para menteri-menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik, makin memberikan ruang untuk berinovasi, berkreasi namun juga bertanggung jawab tetap menjaga *governance basic* dari prinsip pengelolaan korporasi dan bursa yang baik," ujar Sri Mulyani tegas.

Untuk mendukung keberhasilan program-program tersebut tahun ini, OJK bersama *stakeholders* akan terus memantau perkembangan pasar modal global dan domestik, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.



# ***Bullion Bank, Alternatif Masyarakat Mengelola Emas***

*Bullion bank* atau bank emas merupakan bidang usaha yang diatur teknisnya dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Regulasi ini bertujuan mengatur kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas oleh lembaga jasa keuangan (LJK) guna mengoptimalkan pemanfaatan emas di Indonesia.

**K**egiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk Simpanan Emas,

Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Keberadaan bulion

memungkinkan masyarakat menyimpan dan memanfaatkan emas sebagai instrumen keuangan, mirip dengan konsep bank dan uang fiat dalam sistem keuangan moneter.

Konsep ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Turki dan Malaysia. Bank emas berperan dalam mengumpulkan emas dari berbagai sumber, termasuk masyarakat yang menabung emas, perusahaan tambang, serta industri pengolahan emas domestik.

LJK yang ingin menjalankan usaha ini diwajibkan memiliki izin dari OJK serta memenuhi persyaratan modal dan tata kelola yang ketat. Dua lembaga keuangan, PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), telah mendapat izin untuk mengoperasikan bisnis bulion dari OJK.

Penyelenggaraan usaha bulion





dinilai memiliki sejumlah manfaat bagi perekonomian nasional. Pertama, meningkatkan akses masyarakat terhadap investasi emas, baik melalui skema simpanan maupun pembiayaan. Kedua, mendorong stabilitas sektor keuangan, karena emas merupakan aset lindung nilai yang relatif aman. Ketiga, memperkuat peran Indonesia dalam pasar emas global, mengingat negara ini merupakan salah satu produsen emas terbesar di dunia.

Perlu diketahui, tak semua emas dapat ditransaksikan sebagai kegiatan usaha bulion. Emas yang dapat ditransaksikan dalam bulion adalah logam mulia berbentuk batangan atau lempengan serta tidak berupa mata uang, dengan kandungan *Aurum* (Au) paling rendah 99,9%.

Selain itu, emas yang ditransaksikan merupakan standar emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar emas yang berlaku sesuai dengan praktik internasional.

Dalam aturan OJK juga disebut bahwa lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion wajib memenuhi batas minimum gramasi emas yang akan ditransaksikan pada kegiatan perdagangan emas paling sedikit 500 gram per transaksi.

Dengan kehadiran bulion, masyarakat kini memiliki opsi baru dalam menyimpan dan mengelola emas dengan lebih aman dan terstruktur.

Setelah resmi diluncurkan, masyarakat sepenuhnya bisa memanfaatkan layanan bulion yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan. Selama ini, meski sudah ada yang menjalankan usaha simpanan emas seperti Pegadaian, namun belum berstatus bulion dan hanya bersifat titipan.

Dengan diluncurkannya bulion, selanjutnya lembaga jasa keuangan terutama Pegadaian dan BSI yang sudah mendapatkan izin dapat menyediakan produk baru berbasis emas seperti deposito emas dan pembiayaan emas.

Berikut sejumlah manfaat kehadiran bulion bagi masyarakat:

1. Instrumen Investasi yang Aman  
Emas dikenal sebagai aset lindung

nilai (*safe haven*) yang tahan terhadap inflasi. Dengan adanya bulion, masyarakat dapat menabung emas secara lebih aman dan praktis.

2. Akses Mudah terhadap Pembiayaan Berbasis Emas

Bulion memberikan fasilitas pembiayaan berbasis emas, seperti gadai emas dan pinjaman dengan jaminan emas, yang dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa harus menjual asetnya.

3. Meningkatkan Likuiditas dan Monetisasi Stok Emas

Emas yang selama ini hanya disimpan oleh masyarakat kini dapat dimanfaatkan dalam sistem keuangan melalui bulion, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.

4. Mengurangi Ekspor Emas Mentah  
Dengan adanya bulion, pemerintah dapat mengurangi ekspor emas mentah dan mengoptimalkan pengelolaan emas di dalam negeri, yang pada akhirnya meningkatkan cadangan devisa nasional.

5. Meningkatkan Inklusi Keuangan  
Kehadiran bulion memperluas akses layanan keuangan berbasis emas, termasuk bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan konvensional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bulion memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan kehadiran bulion, masyarakat kini memiliki alternatif baru dalam mengelola emas mereka, baik sebagai tabungan maupun sebagai instrumen investasi yang lebih fleksibel dan aman. Yuk, segera ke LJK yang telah ditunjuk OJK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan mulai tabungan atau investasi emas kita.

# OJK Gelar Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak Syariah) 2025

Perkuat ekosistem keuangan syariah serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat, OJK gelar Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak Syariah) 2025 bertepatan dengan momentum Ramadan yang penuh berkah.



**M**emeriahkan bulan Ramadan 1446 H, OJK gelar rangkaian kegiatan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak Syariah) 2025 selama satu bulan penuh sampai berakhirnya Ramadan. Dilaksanakan dua rangkaian kegiatan utama, yaitu KOLAK (Kajian dan Obrolan Seputar Keuangan Syariah) dan KURMA (Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan). KOLAK akan diisi oleh kegiatan webinar edukasi, *podcast* Ramadan, *talkshow* radio, *school of syariah*, dan *daily content* Ramadan.

Gerak Syariah 2025 merupakan kampanye nasional keuangan syariah selama Bulan Ramadan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dalam rangka membangun perekonomian nasional dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Bertepatan dengan momentum Ramadan, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mendorong pelaku usaha jasa keuangan syariah untuk terus melakukan inovasi dan semakin aktif memahami kebutuhan masyarakat agar semakin banyak konsumen yang memanfaatkan jasa dan layanan jasa keuangan syariah. "Ini adalah PR kita semua, OJK dan *stakeholder* untuk terus mengedukasi masyarakat tentang keuangan syariah. Perkuat branding keuangan syariah agar semakin dikenal masyarakat," kata Friderica.



Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi juga mengatakan kegiatan GERAK Syariah 2025 merupakan kampanye kolaboratif keuangan syariah bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS), Asosiasi Industri Jasa Keuangan Syariah, Bank Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), media massa, *influencer*, tokoh agama, dan tokoh penggerak keuangan syariah lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh 37 Kantor OJK di daerah.

Berdasarkan data pelaksanaan Gerak Syariah 2025, Ismail mengatakan kegiatan ini telah menghasilkan 1.007 kegiatan literasi dan inklusi keuangan, yang terdiri dari 742 kegiatan literasi dan 265 kegiatan inklusi keuangan. Gerak Syariah 2025 diikuti oleh peserta

edukasi keuangan 3.057.194 orang dan peserta inklusi 1.175.019 orang.

Angka tersebut membuktikan bahwa sektor keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan hal itu terlihat dari kinerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada Desember 2024, intermediasi perbankan syariah tumbuh positif dengan pembiayaan tumbuh 9,9% menjadi Rp643,5 triliun dengan NPF terjaga sebesar 2,12%. Sementara DPK tumbuh 10,1% menjadi sebesar Rp753,6 triliun.

Sedangkan *market cap* syariah tercatat sebesar Rp6.825,3 triliun atau naik 11,1%. Adapun nilai *Asset Under Management* (AUM) syariah mencapai Rp50,5 triliun atau tumbuh 18,2% (*yoy*) dan sukuk (korporasi dan negara) sebesar Rp1.682,9 triliun atau tumbuh 12,9% (*yoy*). Sementara aset asuransi syariah tumbuh 5,8% menjadi sebesar Rp46,55 triliun. Adapun aset piutang pembiayaan syariah tumbuh 11,3% menjadi Rp33,8 triliun.



# Pemanfaatan Akal Imitasi (AI) dalam Layanan Sektor Jasa Keuangan

Akal Imitasi (AI) yang semakin berkembang saat ini telah menjadi bagian penting dari berbagai bidang termasuk Sektor Jasa Keuangan. Seperti apa perannya?

**T**ransformasi digital di sektor perbankan terus berkembang pesat, terutama setelah pandemi Covid-19 yang menjadi katalisator mempercepat adopsi teknologi. Digitalisasi menjadi langkah penting bagi Sektor Jasa Keuangan (SJK) khususnya bank untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah

tuntutan masyarakat yang semakin mengedepankan kepraktisan.

Laju digitalisasi semakin pesat dengan kehadiran kecerdasan buatan. Keberadaan AI memiliki potensi untuk mengubah dunia dalam banyak cara, salah satunya dalam industri perbankan. Misalnya, kehadiran *internet banking* yang menyediakan

layanan *chatbot* untuk memberikan informasi kepada nasabah tentang produk perbankan. Layanan *chatbot/voice assistant* inilah yang menjadi titik awal keterlibatan AI dalam layanan keuangan. Menyusul layanan-layanan lainnya yang ikut memanfaatkan AI seperti *document processing*, *transaction monitoring*, mendeteksi

*fraud* dan *money laundering*, serta *decision engine* dalam mempercepat proses *credit scoring*.

AI pada dasarnya merupakan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai macam teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan secara mandiri. AI bekerja dengan melibatkan pengembangan algoritma dan model komputasi yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan pengalaman, serta membuat keputusan atau melakukan tugas tanpa campur tangan manusia secara langsung.

Contoh penerapan AI yang umum meliputi pengenalan suara dan wajah yang saat ini telah digunakan dalam industri keuangan untuk bisa membantu mengidentifikasi penipuan, membuat rekomendasi investasi, dan mengelola risiko.

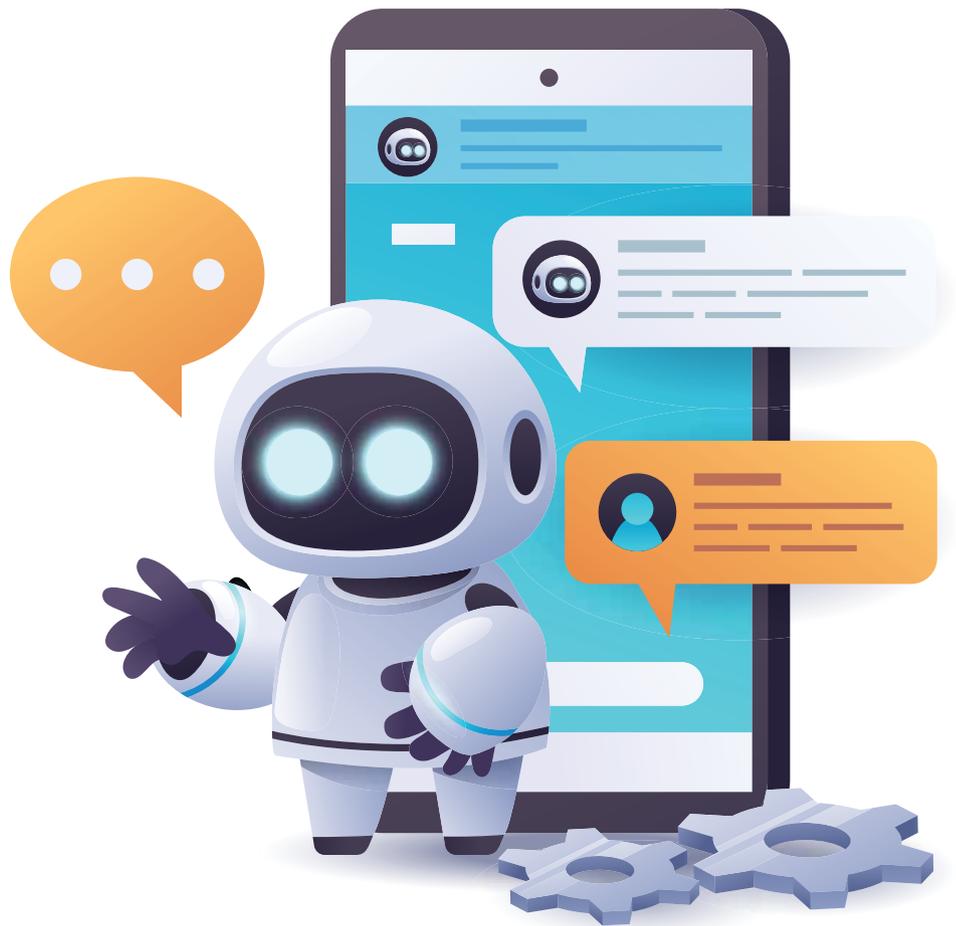
AI juga berperan penting dalam meminimalisir risiko penipuan. Sistem pendeteksi penipuan akan menganalisis perilaku pembelian seseorang dan memicu peringatan jika ada sesuatu di luar kebiasaan yang kita lakukan. Misalnya potensi aktivitas keuangan yang tidak wajar atau mencurigakan seperti pencucian uang dan penipuan.

Selain itu, pemanfaatan AI juga bisa digunakan untuk menganalisis kebutuhan nasabah perbankan dengan cara mengumpulkan dan memproses data dari berbagai sumber. Misalnya, digunakan untuk memberikan rekomendasi produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah atau untuk menjawab pertanyaan nasabah secara otomatis. Salah satu manfaat terbesar AI adalah menganalisis data dan mengidentifikasi tren yang mungkin tidak terlihat oleh manusia dalam waktu yang singkat. Hal ini berbeda dengan manusia yang

tidak bisa menganalisis semua data yang tersedia secara manual untuk membuat keputusan investasi yang tepat.

Semakin canggih pemanfaatan AI dalam layanan SJK saat ini, dapat terlihat dengan peralihan fungsi PIN dan *password* sebagai metode otentikasi menjadi biometrik. Sistem ini dapat membantu mencegah penipuan *online* yang marak terjadi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada berbagai potensi cukup tinggi terkait penyalahgunaan AI yang dapat merugikan konsumen bank. Namun, manfaat adanya AI juga bisa membantu proses bisnis bank. Beberapa risiko AI yang teridentifikasi antara lain bias algoritma, *deepfakes*, dan kemampuan membuat keputusan sendiri. Oleh karena itu, kepentingan



Sekian banyak peran AI dalam layanan SJK, penting juga untuk mempertimbangkan risiko dari penggunaan AI. OJK sebagai regulator tegas mengingatkan SJK terkhusus perbankan agar tidak asal dalam menggunakan AI dalam proses bisnisnya.

nasabah atau konsumen harus diperhatikan dengan seksama. Mengingat ke depannya AI akan terus berkembang. Sejatinnya teknologi AI ini dapat digunakan untuk kebaikan, bukan kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan privasi seseorang.

# Pengaturan Regulasi Bagi *Financial Influencer* di Berbagai Negara

**Meski terlihat menggiurkan, profesi sebagai *financial influencer* yang cukup mendatangkan banyak cuan, ternyata bisa diganjar hukuman berat, lho. Apalagi jika tidak memiliki sertifikat atau tidak berizin, siap-siap diburu OJK.**

**K**epopuleran platform media sosial berbasis video saat ini memang membuka pintu rezeki bagi mereka yang ingin menjadi seorang *influencer* pada dunia keuangan atau dikenal dengan sebutan *financial influencer* (*finfluencer*).

Profesi menjadi seorang *finfluencer* sebenarnya sama dengan profesi *influencer* lainnya. Namun seorang *finfluencer* umumnya memiliki latar belakang atau pernah memiliki pengalaman dalam bidang keuangan sebelumnya. Wawasannya mengenai keuangan itulah yang mereka

sebarluaskan kepada audiens. Umumnya, *finfluencer* memberikan informasi terkait tip keuangan, *review* produk investasi, dan mengangkat berbagai topik keuangan yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat.

Gaya penyampaian yang ringan dan santai, diksi yang mudah dicerna, pemilihan topik yang menarik, tips yang mudah dipahami, menjadikan *finfluencer* mudah sekali diterima Gen Z yang haus akan informasi seputar keuangan. Alih-alih membaca melalui kanal berita atau buku, Gen Z lebih nyaman menikmati setiap tayangan informasi keuangan melalui media sosial di gawai canggih mereka. Tak sedikit pula Gen Milenial yang ikut tertarik menonton tayangan *finfluencer*. Lantas apa pengaruh *finfluencer*? Ternyata pengaruhnya, banyak Gen Z yang mulai berinvestasi atau menabung.



Sisi negatif *finfluencer* kurang patut ditiru, yaitu beberapa *finfluencer* cenderung memamerkan gaya hidup *highclass* yang bisa membuat orang mengejar standar hidup yang tinggi. Belum lagi ada *finfluencer* yang kurang mumpuni karena keterbatasan ilmu keuangan mereka. Prediksi tentang potensi keuntungan yang disampaikan seringkali meleset, membuat audiens yang mengikuti sarannya justru menderita kerugian.

Tentu saja hal ini sangat berbahaya, ketika sudah banyak orang yang mudah percaya pada *finfluencer*, informasi sembarangan yang terlanjur tersebar dapat berdampak buruk. Usahakanlah selalu melakukan cek dan ricek terlebih dahulu apa yang *finfluencer* bicarakan. Tidak langsung percaya begitu saja. Misalnya, mencari informasi dari sumber lain yang terpercaya atau berdiskusi dengan orang yang sudah berpengalaman di dunia finansial.

Agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan, OJK sebagai regulator menertibkan aksi para *finfluencer*, terutama mereka yang tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap produk investasi keuangan. Bukan berarti tanggung mereka harus diberangus, sebab *finfluencer* yang memiliki kapabilitas justru bisa berperan positif memberikan literasi keuangan terhadap publik.

Untuk memastikan kapabilitasnya, para *finfluencer* harus dibekali dengan pelatihan produk-produk keuangan, kemudian dilakukan uji kompetensi dan bersertifikat untuk melakukan kerja *finfluencer*, sebagaimana sertifikasi WPPE atau WMI oleh lembaga kredibel di pasar modal.

Melansir Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995, ditegaskan bahwa pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Jika penasihat investasi tak memperoleh izin, maka ancaman pidana yang menunggu mereka telah diatur dalam Peraturan OJK No. 5/2019 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi dan UU Pasar Modal Pasal 93.

Bagaimana dengan *finfluencer* di luar Indonesia yang juga dapat diakses tayangannya? Regulasi *finfluencer* di

pelanggaran bagi *finfluencer* yang aktivitasnya tidak berizin yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Layanan 2007 (CMSA).

Di Amerika Serikat, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menjadi garda terdepan dalam tindakan terhadap *finfluencer* yang mempromosikan aset kripto. Di Uni Eropa, Otoritas Sekuritas dan Pasar



negara lain seperti di Singapura diatur oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS). Dalam aturannya, *finfluencer* yang memberikan nasihat keuangan harus memiliki lisensi dan diatur oleh Undang-Undang Penasihat Keuangan (FAA). Sementara di Malaysia, Komisi Sekuritas Malaysia (SC) telah memperbarui Catatan Panduan tentang Penyediaan Saran Investasi (Catatan Panduan). SC mengatur

Europa (ESMA) meluncurkan tindakan pengawasan umum untuk menilai apakah perusahaan investasi dan lembaga kredit mematuhi persyaratan MiFID II tentang komunikasi pemasaran.

Informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan OJK dapat diakses di media sosial Sikapi Uangmu dan OJK Indonesia.



## Peran Pegadaian sebagai Salah Satu Bank Bulion Pertama di Indonesia

**Dr. Damar Latri Setiawan, S.E., M.M.,** Direktur Utama (Dirut) PT Pegadaian

**P**T Pegadaian (Persero) telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa melakukan kegiatan usaha bulion. Pegadaian merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang mendapat izin menjalankan usaha bulion dari OJK.

Mengutip aturan OJK, kegiatan usaha bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Kegiatan usaha bulion meliputi simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, dan atau penitipan emas.

Sebagaimana diketahui, OJK telah mengeluarkan izin untuk menjalankan kegiatan usaha bulion melalui surat Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion PT Pegadaian dengan nomor surat S-325/PL.02/2024. Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyambut baik peraturan OJK tersebut, mengingat 2 tahun terakhir ini Pegadaian menanti restu untuk dapat melaksanakan usaha ekosistem emas tersebut. Menurutnya ini merupakan sebuah pencapaian, dimana Pegadaian menjadi perusahaan pertama yang berhasil mengantongi izin usaha bulion di Indonesia.

### **Menurut Bapak, apa manfaat bank bulion bagi masyarakat?**

Bagi Lembaga Jasa Keuangan:

- Meningkatkan nilai tambah di dalam

- negeri, sejalan dengan Asta Cita.
- Inovasi bisnis baru sehingga berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan berkontribusi pada *benefit* yang diberikan kepada negara dan rakyat Indonesia melalui penerimaan pajak.
- Meningkatkan inklusi keuangan dan *customer engagement*.

Bagi Masyarakat:

- Investasi emas inklusif bisa dimulai dengan nilai rendah dan terjangkau.
- Instrumen investasi dengan nilai yang terjaga dan cenderung meningkat.
- Sumber pembiayaan baru bagi masyarakat umum di semua lapisan.

**Bagaimana reaksi masyarakat terhadap kegiatan bulion yang dilakukan Pegadaian?**

Alhamdulillah Pegadaian sebagai pelopor sekaligus menjadi Bank Emas Pertama di Indonesia yang siap memperluas ekosistem emas di Tanah Air. Lahirnya Bank Emas di Indonesia disambut antusias oleh masyarakat. Terbukti 1,5 bulan sejak diluncurkan, salah satu produk layanan bulion atau Bank Emas Pegadaian seperti Deposito Emas hampir mencapai 1 ton emas. Selain itu, produk Pinjaman Modal Kerja Emas saat ini juga telah disambut hangat oleh industri emas di Indonesia, dimana hingga saat ini Pinjaman Modal Kerja (PMK) mencatatkan penyaluran pinjaman lebih dari 150 kg emas.

**Bagaimana edukasi dan sosialisasi yang dilakukan mengingat Pegadaian merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang mendapat izin menjalankan usaha bulion dari OJK?**

Pegadaian aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya investasi emas dan menyediakan inovasi produk berbasis emas seperti

tabungan emas yang terjangkau serta layanan pembiayaan bagi pelaku industri emas nasional sehingga mampu berekspansi dalam kegiatan usaha dan memiliki daya saing global. Selain itu, kami juga aktif menjalin komunikasi dan sinergi dengan asosiasi maupun juga perusahaan-perusahaan dalam ekosistem bulion di dalam maupun luar negeri. Hal ini kami harapkan akan mendorong masyarakat maupun industri untuk memilih menggunakan produk dan layanan bulion di Indonesia di dalam

**dapat mengakses layanan bank bulion?**

Untuk produk Deposito Emas, masyarakat dapat mengakses melalui aplikasi Pegadaian Digital, sedangkan untuk Pinjaman Modal Kerja Emas, Perdagangan, dan Titipan Emas Korporasi, kami telah menyediakan RM (*Relationship Manager*) yang siap melayani kebutuhan masyarakat terhadap produk bulion Pegadaian.

**Apa tips masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bulion?**



negeri. Dengan pendekatan ini, Pegadaian tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar emas yang besar tetapi juga mendukung pengembangan industri emas yang berkelanjutan di tingkat nasional.

**Sektor usaha bulion meliputi simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK. Lantas bagaimana masyarakat**

Memilih tempat yang terpercaya. Pegadaian merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang menjalankan usaha bulion pertama dan terlengkap di Indonesia dan menyediakan layanan *one stop service* bagi masyarakat maupun perusahaan yang bergerak pada industri emas. Menyimpan emas di tempat aman. Di Pegadaian semua emas fisik yang ada disimpan pada ruang penyimpanan berstandar internasional dan diasuransikan.



# OJK Terbitkan 9 Aturan Perkuat Lembaga Jasa Keuangan

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan 9 (sembilan) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai upaya untuk mengembangkan dan memperkuat pengawasan bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).**

**H**adirnya 9 (sembilan) aturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan risiko lembaga jasa keuangan secara efektif.

Penerbitan sembilan POJK di akhir 2024 dimaksud merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yaitu menciptakan bidang PVML yang lebih stabil, transparan, dan dapat memberikan perlindungan konsumen yang lebih baik, sekaligus mendorong pertumbuhan bidang PVML yang inklusif dan berkelanjutan.

Sembilan POJK tersebut adalah:

1. POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK 39/2024).
2. POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40/2024).
3. POJK Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (POJK 41/2024).
4. POJK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi PVML (POJK 42/2024).
5. POJK Nomor 43 Tahun 2024

tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia PVML (POJK 43/2024).

6. POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (POJK 46/2024).
7. POJK Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan (POJK 47/2024).
8. POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi PVML (POJK 48/2024).
9. POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan PVML (POJK 49/2024).

Peningkatan kemampuan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan risiko secara efektif di bidang PVML diperlukan untuk mewujudkan sektor keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Untuk itu, OJK menerbitkan POJK 42/2024 yang mengatur antara lain mengenai pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pengelola, sistem pengendalian internal serta penguatan organisasi dan fungsi manajemen risiko di bidang PVML.

Selain itu, untuk mendorong penerapan tata kelola yang baik di bidang PVML, OJK menerbitkan POJK 48/2024 yang mengatur berbagai aspek penting antara lain mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, satuan kerja yang bertanggung jawab atas pengendalian internal, serta

penanganan benturan kepentingan.

Terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang PVML, OJK menerbitkan POJK 43/2024 yang mencakup pengembangan SDM yang berkelanjutan, kewajiban penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang PVML sehingga dapat beradaptasi dengan tantangan serta perkembangan industri.

Untuk memperkuat pengawasan di bidang PVML, OJK menerbitkan POJK 49/2024 yang mengatur berbagai ketentuan terkait tata cara pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan.

Pada Industri Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, OJK menerbitkan POJK 46/2024 sebagai upaya pengembangan dan penguatan di sektor ini. Peraturan ini mengatur beberapa hal yang belum ada di peraturan sebelumnya, seperti pemanfaatan teknologi dalam pembiayaan digital, sistem pengamanan, serta perlindungan data pribadi. Selain itu, juga diperjelas mengenai peran asosiasi dan ketentuan mengenai unit usaha syariah.

Sedangkan pada Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang disebut Pinjaman Daring (Pindar), OJK menerbitkan POJK Nomor 40/2024 untuk memperkuat regulasi yang telah ada sebelumnya, di antaranya mengenai penilaian tingkat kesehatan penyelenggara pindar, penguatan manajemen risiko dan tata kelola, ketentuan mengenai unit usaha syariah, serta penguatan kewajiban kredit *scoring*.

Penerbitan peraturan ini diharapkan dapat mendorong penyelenggara pindar untuk beroperasi dengan

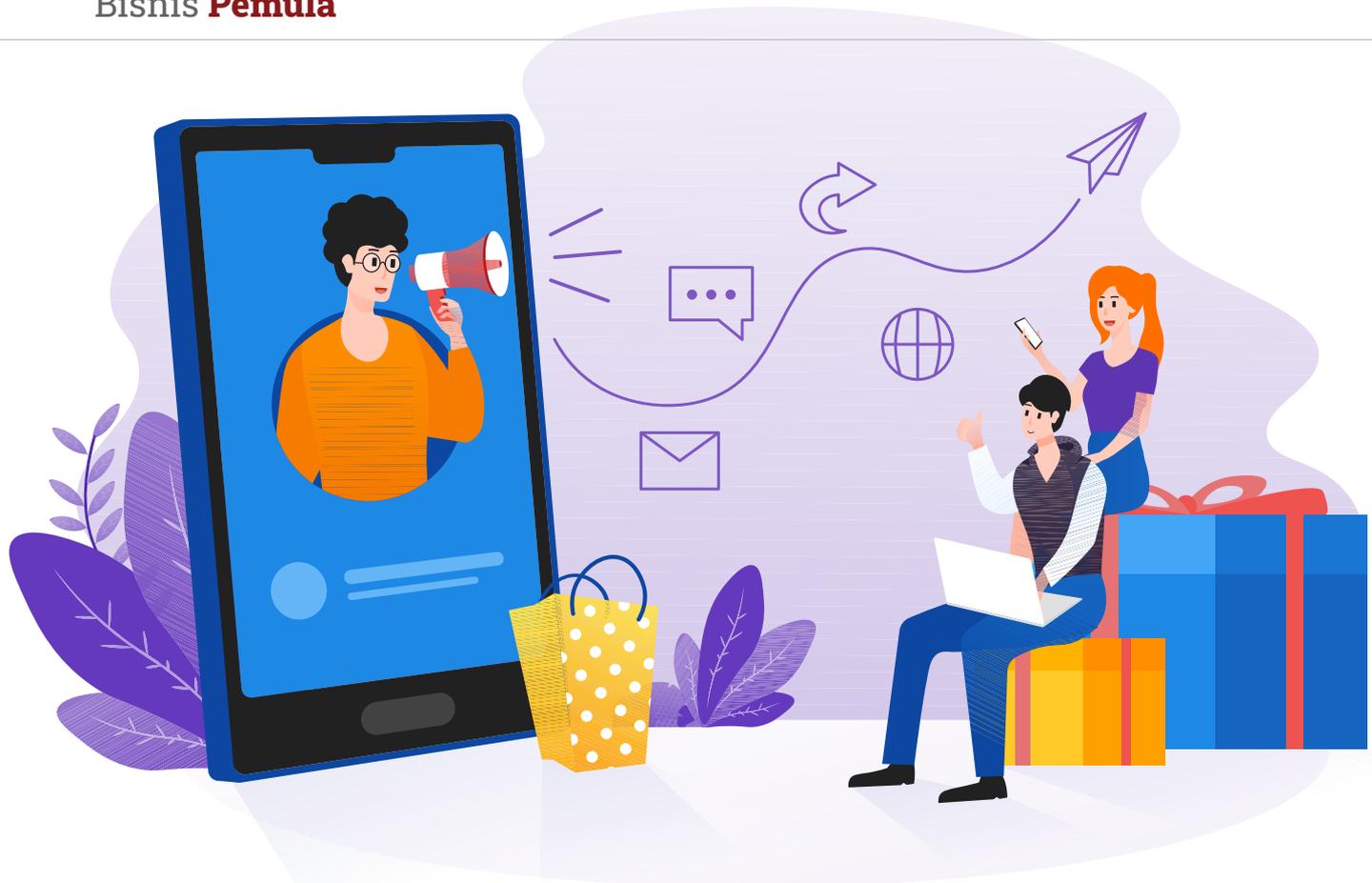
prinsip kehati-hatian, dan memberi perlindungan yang lebih baik bagi pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*).

Dalam rangka mendukung perkembangan sektor Pergadaian yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan, OJK menerbitkan POJK 39/2024 yang menyempurnakan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Antara lain mengenai kewajiban memiliki pemegang saham pengendali, peningkatan permodalan, kewajiban memiliki penaksir bersertifikat, penilaian kualitas piutang pinjaman dan batas maksimum pemberian pinjaman, serta penerapan manajemen risiko yang efektif.

Sementara itu, pada Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM), OJK menerbitkan POJK 41/2024 yang mengatur berbagai ketentuan untuk memperkuat sektor LKM, antara lain pengelompokan LKM berdasarkan skala usaha, yang dibagi menjadi skala kecil, menengah, dan besar dengan kriteria tertentu. Selain itu diatur mengenai penilaian kualitas pinjaman dan penyisihan penghapusan pinjaman, serta pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat UU P2SK mengenai Koperasi di Sektor Jasa Keuangan (KSJK), OJK menerbitkan POJK 47/2024 yang mencakup berbagai ketentuan, di antaranya mengenai ruang lingkup dan permodalan, serta perizinan usaha bagi KSJK yang memilih untuk menjadi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Sejatinya, penyusunan sembilan POJK ini melibatkan berbagai pihak terkait dan memperhatikan masukan dari pelaku usaha di bidang PVML dan para pemangku kepentingan di bidang PVML.



## Penghasilan Tambahan Melalui Tren *Affiliate Marketing*

*Affiliate Marketing* atau pemasaran terafiliasi berkembang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini, berkat kemajuan teknologi digital yang semakin meningkat dan masifnya penggunaan platform *e-commerce*. Hal ini membuat banyak masyarakat tertarik untuk bergabung dalam program afiliasi untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

**T**erjadi semacam disrupsi dalam model belanja masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, banyak orang beralih dari cara berbelanja tradisional ke belanja *online* melalui *e-commerce*. Tumbuh suburnya *e-commerce* di Tanah Air melahirkan tren-tren baru di dalam dunia pemasaran digital. Salah satu yang tengah banyak diperbincangkan adalah *affiliate marketing* atau pemasaran terafiliasi.

Pemasaran terafiliasi adalah program yang mempromosikan produk atau jasa dengan mendapatkan penghasilan dari setiap transaksi. Pemasaran terafiliasi merupakan program pemasaran berbasis komisi yang secara tidak langsung menghubungkan calon pembeli dengan produk melalui tautan rujukan. Program ini digadang-gadang memegang peran penting dalam peta persaingan *e-commerce* di Indonesia.

Tren pemasaran terafiliasi semakin populer karena banyak yang ingin mencari penghasilan tambahan dengan cara mudah dan fleksibel, kemudahan dalam menjalankan promosi, dan memiliki potensi penghasilan tanpa memerlukan modal besar. Meski dulu pemasaran terafiliasi hanya menjadi peluang eksklusif bagi para selebritis dan *influencer* berskala besar, tapi kini semua orang bisa memiliki tautan rujukan cukup bermodalkan akun sosial media.

Berkat *e-commerce*, setiap orang dibebaskan berkreasi menciptakan konten dari beragam kategori produk mulai dari *fashion and beauty*, gaya hidup, rumah tangga, makanan dan minuman, hingga elektronik tanpa batas.

Survei yang dilakukan oleh Populix pada Juni 2024 mengungkapkan peningkatan minat masyarakat

terhadap program afiliasi tercermin dari kesadaran mereka akan berbagai manfaat yang diperoleh dengan bergabung dalam program ini.

Hasil survei menunjukkan bahwa 67% responden melihat pemasaran terafiliasi sebagai sumber penghasilan tambahan yang menarik. Sementara itu, 13% memanfaatkan peluang ini untuk membangun bisnis *online* dan memperluas koneksi.

Fleksibilitas waktu juga penting, dimana 13% responden menghargai kemampuan bekerja kapan saja dan dari mana saja dan 7% mengatakan bahwa memiliki *passion* terhadap produk tertentu yang memotivasi mereka untuk bergabung dalam program afiliasi.

Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat program afiliasi ini bukan hanya sebagai cara untuk menghasilkan uang, tetapi sebagai

peluang untuk mengembangkan diri dan menjalankan hobi secara produktif.

Lembaga Jajak Pendapat (Jakpat) pun merilis survei bertajuk *Indonesia E-commerce Trends 1st Semester Of 2023* yang membahas tentang *affiliate link*. Model *affiliate link* dapat membantu menghubungkan pembeli dan *e-commerce*. Dalam survei tersebut, disebutkan bahwa 83% dari Gen Z pernah membuka *affiliate link*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *affiliate link* sedang populer di kalangan anak muda.

*Affiliate marketing* menjadi peluang yang sangat layak untuk dipertimbangkan bagi siapa pun yang ingin menambah penghasilan di era digital. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi, tren ini menjadi salah satu jalan bagi banyak orang untuk mencapai tujuan finansial mereka.



# Strategi Investasi di Tahun Ular Kayu

**Simbol Ular Kayu, yang mencerminkan kecerdasan, ketenangan, dan pertumbuhan, mengajak kita untuk berpikir strategis dan memanfaatkan peluang yang ada. Lantas, apa saja jenis investasi yang menguntungkan tahun ini, berikut ulasannya.**

**T**ahun 2025 dalam sistem penanggalan Imlek dikenal sebagai Tahun Ular Kayu Yin. Elemen utama yang mendominasi tahun ini adalah Kayu Yin yang terletak di atas Api Yin, sehingga menciptakan kombinasi energi yang saling melengkapi. Oleh karena itu, sebutan yang tepat untuk tahun ini adalah Ular Kayu Yin 2025.

Dengan berkuasanya shio Ular Kayu di tahun ini,

semua teman dan sekutu Ular Kayu akan mendapatkan kemakmuran. Sementara para rivalnya kemungkinan besar akan mengalami kemalangan atau ciong, sehingga harus lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan.

Bagaimana dengan investasi? Apa jenis investasi yang tepat di tahun Ular Kayu ini? Tahun Ular Kayu memiliki simbol kecerdasan, ketenangan, dan pertumbuhan. Elemen



kayu melambungkan fleksibilitas serta inovasi, dua hal yang penting dalam dunia investasi. Teknologi, energi terbarukan, dan agrikultur adalah contoh sektor yang diprediksi mengalami pertumbuhan pesat pada tahun ini.

Jenis investasi yang diprediksi bakal mendatangkan cuan lebih banyak yakni investasi saham, emas, dan properti. Tahun 2025 diprediksi sebagai tahun yang positif untuk pasar saham, terutama di sektor teknologi dan bioteknologi. Perusahaan yang berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan, keamanan siber, dan layanan kesehatan digital memiliki prospek pertumbuhan yang menarik.

Investasi emas tetap menjadi pilihan aman bagi investor pemula di tengah ketidakpastian global. Harga emas diprediksi stabil atau meningkat pada paruh pertama tahun 2025, menjadikannya instrumen yang ideal untuk lindung nilai. Sektor properti,

khususnya perumahan subsidi, menunjukkan potensi besar di Tahun Ular Kayu. Investasi di lokasi strategis dengan infrastruktur yang berkembang dapat memberikan keuntungan jangka panjang.

Sementara itu, aset kripto sebagai jenis aset modern mewakili inovasi dan fleksibilitas yang sejalan dengan makna elemen kayu.

Sebelum jual-beli aset kripto, baik pemula maupun berpengalaman, sebaiknya lakukan riset mendalam sebab kripto masih menjadi ranah yang sangat dinamis dan terus berkembang. Bagi investor pemula, mulailah dengan instrumen berisiko rendah seperti *stablecoin* atau saham *blue-chip*. Fokus pada edukasi dan pemahaman pasar sebelum melangkah lebih jauh.

Dan bagi investor yang sudah berpengalaman, eksplorasi sektor-sektor baru seperti *DeFi*, *NFT*, atau *metaverse*. Gunakan momentum tahun Ular Kayu ini untuk memperluas

jaringan dan mengeksplorasi peluang keuntungan lainnya.

Meski peluang cuan cukup tinggi, risiko yang akan muncul tetap harus diwaspadai. Fluktuasi harga, volatilitas tinggi tetap menjadi karakteristik utama aset kripto, yang berarti perubahan harga yang tajam harus siap untuk dihadapi. Regulasi pemerintah juga patut diperhatikan sebab perubahan kebijakan di berbagai negara dapat memengaruhi sentimen pasar dan harga aset kripto.

Untuk mengantisipasi risiko, Anda dapat mengatur strategi yang tepat agar tidak terlalu rugi jika dihadapkan pada situasi yang sulit. Belilah aset kripto secara bertahap untuk mengurangi dampak fluktuasi harga. Rutin memantau sentimen pasar dengan mengikuti berita dan analisis pasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, lakukan diversifikasi pada beberapa aset kripto.

# Konsumen Laporkan *Trading* Emas Ilegal

Periode Januari hingga Maret 2025, OJK mencatat laporan konsumen mengenai adanya entitas ilegal yang menawarkan investasi di Telegram dengan modus *trading* emas melalui tautan <https://app.glint789.com>. Konsumen juga bertanya mengenai informasi peraturan dan mekanisme pendaftaran izin usaha Pergadaian bagi Koperasi Konsumen yang memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

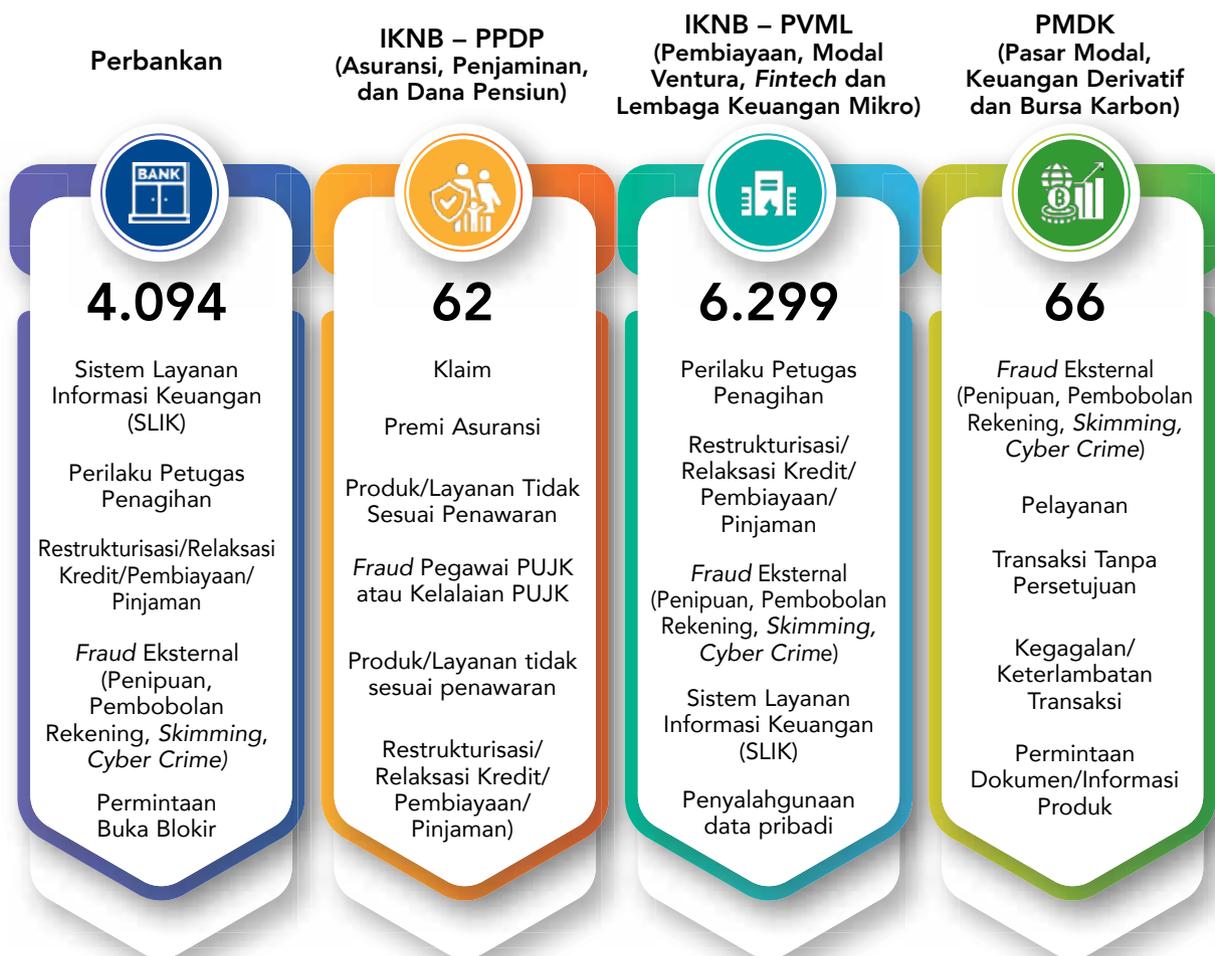
Informasi tersebut berdasarkan data layanan dari Kontak OJK 157. Triwulan pertama 2025, OJK menerima 65.910 layanan konsumen. Layanan tersebut terdiri dari 10.521 pengaduan dan 55.389 pertanyaan sektor perbankan, IKNB-PPDP, IKNB-PVML, dan PMDK.

Sebanyak 3.062 merupakan pengaduan bidang pinjaman

*online* multiguna, 1.470 mengenai pembayaran angsuran multiguna, dan 835 mengenai kredit multiguna. Sebanyak 22.232 pertanyaan mengenai produk pinjaman *online* multiguna, 7.077 pertanyaan mengenai pembayaran angsuran multiguna, dan 6.271 pertanyaan mengenai transfer dana.

Berdasar data di atas, OJK akan terus melakukan tindakan perlindungan konsumen melalui langkah preventif, maupun kuratif. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di kontak157.ojk.go.id, *Whatsapp* 081157157157 dan *email* konsumen@ojk.go.id. OJK juga akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa keuangan untuk lebih cermat dan teliti dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Cara ini terus dilakukan agar konsumen di Indonesia terlindungi dengan baik.

## Data Layanan dan Kontak OJK Data Pengaduan Tahun 2025 Periode 1 Januari – 31 Maret 2025



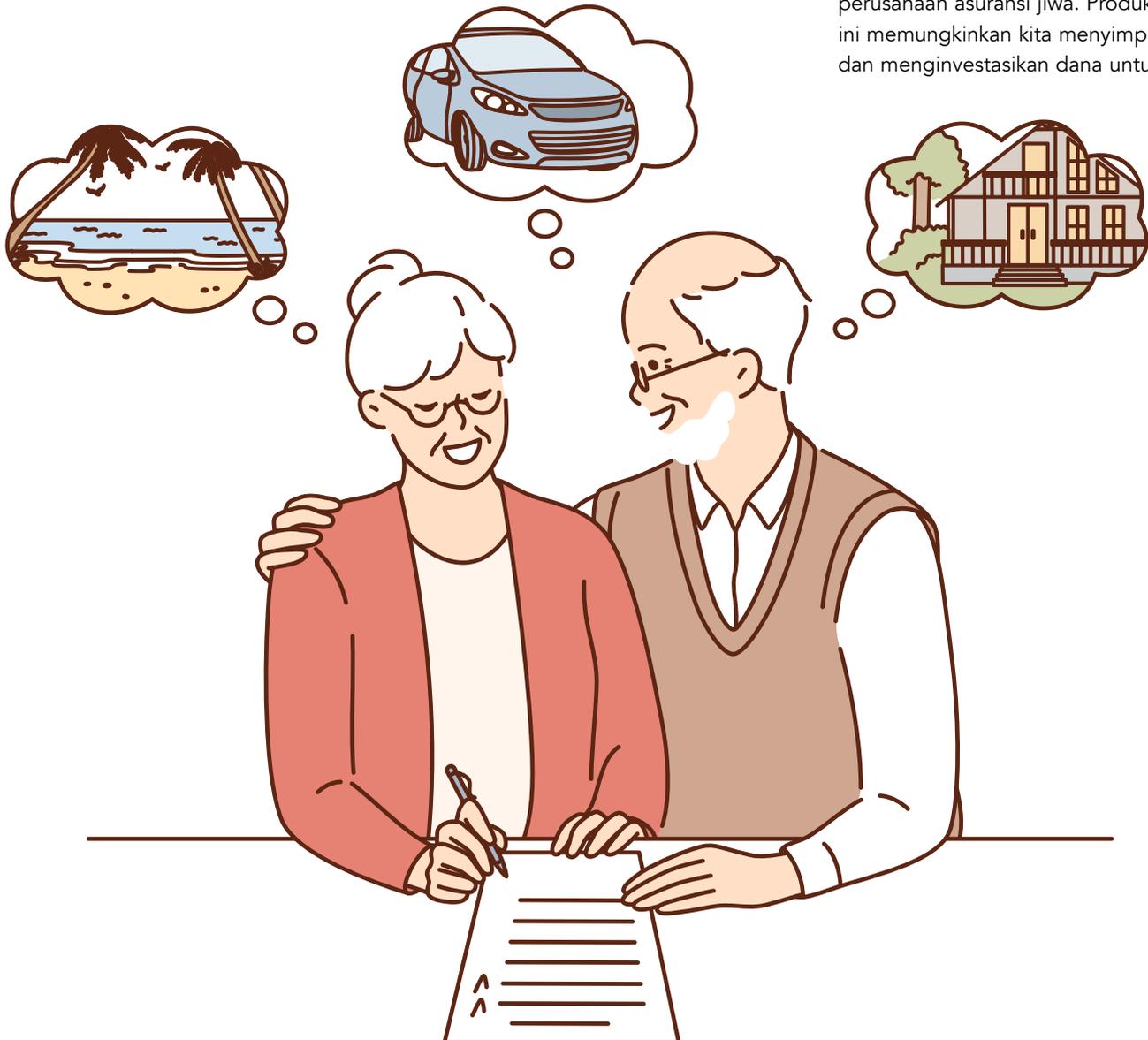
# Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Solusi Siapkan Jaminan Masa Tua

**Punya tabungan pensiun itu penting, apalagi kalau ingin hidup nyaman di masa tua. Salah satu cara menyiapkannya adalah lewat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).**

**D**ana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan solusi untuk kita yang ingin mempersiapkan masa pensiun dengan lebih terencana. Program ini memungkinkan kita untuk menyisihkan dana secara berkala, yang kemudian dikelola oleh lembaga keuangan guna memperoleh hasil investasi optimal.

Mekanismenya cukup fleksibel, pilihan pencairannya juga ada. Intinya, ada manfaat jangka panjang yang bisa didapatkan oleh pesertanya. Program DPLK menjadi salah satu solusi menyiapkan dana pensiun untuk menjamin masa tua.

DPLK adalah program pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan keuangan, seperti bank atau perusahaan asuransi jiwa. Produk ini memungkinkan kita menyimpan dan menginvestasikan dana untuk



persiapan masa pensiun.

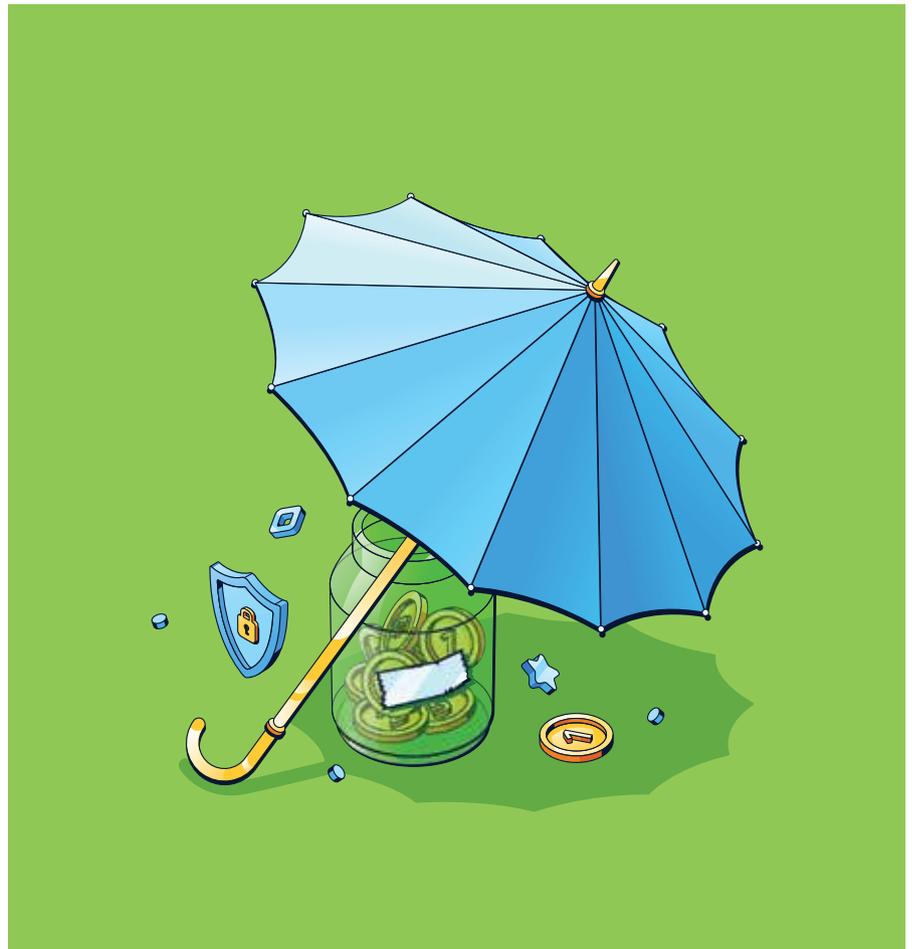
DPLK menggunakan skema yang mirip dengan reksa dana, dimana dana yang kita setorkan akan diinvestasikan oleh manajer investasi di produk yang menguntungkan, termasuk saham, pasar uang, hingga obligasi. Di sisi lain, pencairan dana DPLK mengadopsi sistem deposito, yakni harus dilakukan sesuai kesepakatan. Dengan begitu, produk ini cocok untuk individu yang sulit menabung.

Manfaat terdaftar di DPLK, jika kita sebagai karyawan, maka DPLK memberikan jaminan keuangan setelah pensiun, sehingga tetap memiliki penghasilan meskipun sudah tidak bekerja. DPLK merupakan investasi yang dikelola secara profesional, artinya dana dikelola dengan strategi investasi yang sesuai, sehingga dapat berkembang dengan optimal.

Selanjutnya, jika didaftarkan oleh perusahaan, sebagian iuran bisa ditanggung oleh pemberi kerja, sehingga beban karyawan lebih ringan. Karyawan bisa menyesuaikan jumlah iuran sesuai kemampuan finansial dan bisa meningkatkan setoran untuk hasil yang lebih besar di masa depan.

Iuran DPLK pun dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga membantu mengoptimalkan perencanaan pajak pribadi. Insentif pajak ini membuat program DPLK lebih menguntungkan dibandingkan menabung secara konvensional.

DPLK bisa dicairkan dalam bentuk *lump sum* (sekali bayar) atau anuitas (pembayaran berkala), sesuai kebutuhan setelah pensiun. Terakhir, kita mendapat manfaat tambahan seperti perlindungan asuransi jiwa atau akses ke fasilitas kesehatan tertentu. Manfaat ini memberikan perlindungan ekstra bagi peserta dan keluarganya dalam menghadapi risiko yang tak terduga.



Jika tertarik, yuk simak tips memilih DPLK berikut:

1. Pastikan untuk memeriksa legalitas penyelenggara DPLK. Pemeriksaan bisa dilakukan di *website* resmi penyelenggara DPLK atau bisa pula di *website* OJK.
2. Pastikan kredibilitas pendiri dan pengelolaan penyelenggara DPLK. Pastikan memiliki reputasi yang baik dan terpercaya.
3. Pilih penyelenggara DPLK yang punya portfolio investasi sesuai dengan prinsip dan risiko yang bisa diterima. Cek berapa banyak peserta dan berapa banyak dana yang dikelola.
4. Terakhir, bandingkan beberapa penyelenggara DPLK yang punya kinerja investasi paling baik. Cari informasi ke teman atau orang yang sudah jadi peserta.

# Outlook Sektor Jasa Keuangan 2025

Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil, OJK optimis tren positif kinerja sektor keuangan di tahun 2025 akan berlanjut.



Sinergi dengan berbagai pihak baik pemerintah, otoritas moneter, industri jasa keuangan, para pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dibutuhkan tidak hanya dalam konteks pencapaian outlook kinerja sektor jasa keuangan, namun dalam memaksimalkan kebermanfaatannya bagi perekonomian nasional.



<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pertemuan-Tahunan-Industri-Jasa-Kuangan-2025.aspx>

<https://www.instagram.com/p/DGCTCKKyeEL?igsh=MTVmdWh3N3V2OXV0ag>

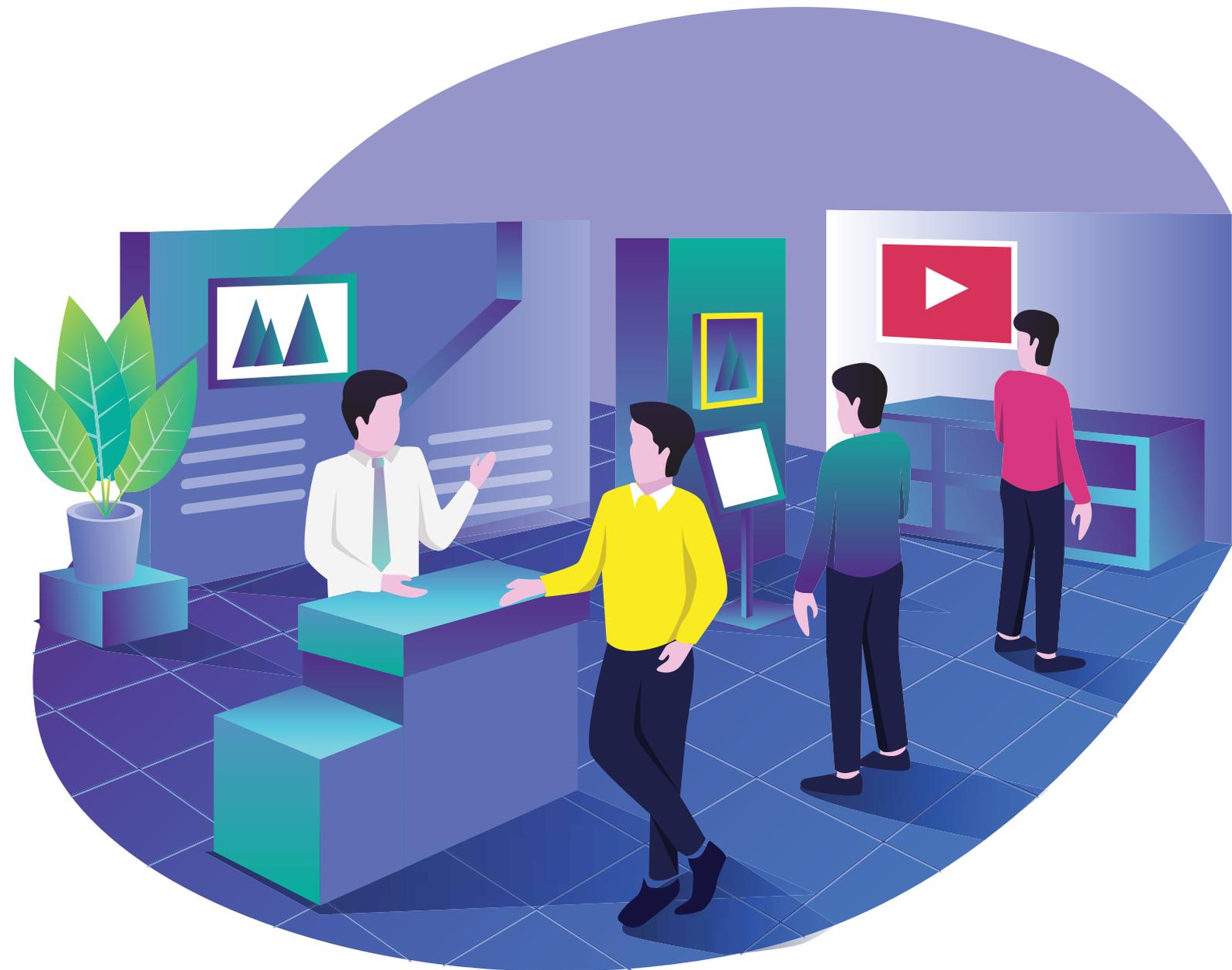
Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil, OJK optimis tren positif kinerja sektor keuangan di tahun 2025 akan berlanjut. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 9-11%, didukung pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 6-8%. Di pasar modal,

penghimpunan dana ditargetkan sebesar Rp220 triliun.

Piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 8-10% dengan mencermati kondisi penjualan kendaraan bermotor yang menurun. Aset asuransi diperkirakan tumbuh sebesar 6-8%. Aset dana pensiun diperkirakan tumbuh 9-11% dan aset penjaminan

diperkirakan tumbuh 6-8%.

Sementara itu, stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diprediksi masih akan berada dalam level terbatas mengingat kinerja perekonomian terjaga stabil sepanjang 2024 di mana perekonomian tercatat tumbuh 5,03%.



## Kenapa UMKM Perlu Mengikuti Pameran/*Expo*?

Ada banyak cara yang bisa dilakukan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendorong penjualan, salah satunya dengan mengikuti pameran dagang. Selain mampu mendorong tingkat penjualan, mengikuti pameran juga memberikan banyak keuntungan untuk bisnis.

**T**ak bisa dimungkiri bahwa pelaku UMKM memerlukan *exposure* dalam memasarkan produk. Masyarakat sering mengenalnya dengan pepatah, 'Tak kenal maka tak sayang.' Jika semakin dikenal masyarakat, ketertarikan dan kepercayaan untuk menggunakan produk atau jasa kita akan semakin tinggi.

Dengan mengikuti pameran UMKM, pelaku UMKM bisa memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Pameran biasanya

identik dengan kunjungan yang ramai, khususnya pengusaha-pengusaha yang ingin membangun mitra kerja. Dengan pameran ini, pelaku UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menjaring calon konsumen dengan berbagai demonstrasi usaha dan produk.

Ada banyak pameran berskala nasional yang dapat diikuti sebagai pintu untuk menuju pameran internasional guna meningkatkan pemasaran. Seperti INACRAFT, IDEA Expo, atau pameran lain yang diselenggarakan oleh Kementerian atau BUMN.

Tidak hanya sebagai sarana memperkenalkan produk sendiri kepada khalayak ramai. Namun keikutsertaan dalam sebuah pameran akan berdampak besar terhadap kelangsungan bisnis. Misalnya meningkatnya omzet dari hari biasa, sehingga bisa digunakan untuk modal tambahan memperluas atau menambah kapasitas produksi. Memperluas relasi yang ditemui di sebuah pameran. Lewat pameran, pelaku UMKM bisa mengevaluasi produknya sendiri. Mulai dari membandingkan produk sendiri dengan perusahaan lain, hingga masukan-masukan dari para pengunjung mengenai kelebihan dan kekurangan produk.

Begitu besar peran pameran bagi sebuah UMKM, karena itu jangan sampai melewatkan kesempatan mengikuti pameran. Namun, perlu dilakukan persiapan matang sebelum memutuskan ikut serta dalam sebuah pameran. Apalagi jika itu pameran berskala internasional.

Lakukanlah riset terhadap pameran yang akan diikuti sebagai langkah awal agar bisa menentukan strategi pemasaran yang sesuai. Cari tahu

tentang profil pengunjung, tema acara, dan peserta yang akan hadir. Selanjutnya, tetapkanlah tujuan yang ingin dicapai, seperti meningkatkan penjualan, mendapatkan prospek baru, atau memperkenalkan produk baru.

Pastikan produk yang akan dipamerkan dalam kondisi terbaik. Buatlah kemasan yang unik dan menarik khusus untuk dijual di pameran. Pastikan jumlah sudah dihitung agar tidak kekurangan stok saat pengunjung pameran sedang ramai.

Setelah persiapan sebelum pameran sudah dilakukan, saatnya berhadapan langsung dengan konsumen. Sambut setiap pengunjung dengan senyuman dan ajak mereka berbicara tentang produk. Berikan informasi yang lengkap dan jawab pertanyaan dengan baik. Pastikan seluruh tim yang bertugas di booth pameran terlatih dengan baik mengenai produk dan strategi pemasaran, mampu menjawab pertanyaan pengunjung dan menjelaskan produk dengan jelas.

Selain itu, pelaku UMKM perlu sigap menyusun ulang produk dengan kreatif apabila sudah banyak produk yang kosong terjual, sehingga produk mudah

dilihat kembali dan diakses oleh pengunjung. Untuk menambah daya tarik pengunjung, bisa memberikan penawaran khusus, seperti diskon, atau hadiah langsung bagi pengunjung yang membeli produk di tempat. Siapkan juga formulir atau alat digital untuk mengumpulkan data pengunjung yang tertarik. Data ini bisa digunakan untuk tindak lanjut setelah pameran berakhir.

Setelah pameran telah selesai terlaksana, lakukan evaluasi kinerja, apakah tujuan tercapai, apakah berjalan baik, apa yang harus diperbaiki untuk mengikuti pameran selanjutnya, dan lain-lain. Analisis hasil penjualan selama pameran dan bandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti pameran, apakah pameran tersebut menguntungkan bagi bisnis kita atau tidak. Setelah itu, tindak lanjuti dengan menghubungi kembali pengunjung yang telah memberikan data mereka. Proses ini sebagai bentuk *after sales* untuk meninjau kepuasan pembeli produk kita.



# Pentingnya Pencatatan Keuangan Sebagai Dasar Pengelolaan Keuangan

Mengelola keuangan keluarga adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan kesejahteraan dan stabilitas finansial. Dengan perencanaan dan strategi yang tepat, kita dapat memaksimalkan potensi keuangan keluarga kita.



**P**engelolaan keuangan keluarga sangat penting karena dapat mengatur arus keluar masuknya uang sehingga dapat diketahui penggunaannya. Alokasi anggaran akan memperbaiki gaya hidup menjadi lebih hemat dan bermanfaat, dan kita pun dapat disiplin menentukan skala prioritas pengeluaran. Disiplin alokasi anggaran tersebut akan membuat arus kas lebih sehat.

Dengan mengelola keuangan, dapat disisir mana hal yang masuk kategori kebutuhan mana yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan adalah hal yang sangat penting bila tidak tersedia akan menghambat aktivitas produktivitas. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang dapat memenuhi selera, memberi kesenangan, memberi keindahan, atau yang sejenisnya. Sebetulnya, keduanya dapat terpenuhi, asalkan kita mampu menerapkan konsep anggaran yang konsisten di mana setiap kali menerima penghasilan segera sisihkan di awal untuk investasi atau tabungan untuk mencapai tujuan keuangan. Biaya hidup disesuaikan dengan berapa sisa penghasilan setelah dikurangi investasi atau tabungan dengan memprioritaskan anggaran untuk menabung atau investasi.

Agar pengelolaan keuangan tertata dan tersusun rapi, maka dibutuhkan pencatatan keuangan yang merupakan alat untuk merekam pergerakan aliran uang. Mengapa perlu dicatat? Sebab uang laksana "air" yang bersifat cair, mudah sekali mengalir. Jika tidak diarahkan lajunya maka alirannya bisa pergi kemanapun tanpa terkontrol. Artinya mudah lupa kemana perginya uang jika tidak dicatat.

Pencatatan keuangan tidak perlu dibuat terlalu rumit. Buku catatan dan kalkulator adalah perangkat dasar untuk membuat laporan keuangan versi rumah tangga, yang penting

konsisten untuk mencatat secara rinci pengeluaran dan pemasukan. Kalau ini sudah bisa dilakukan, dapat diukur kondisi keuangan dan bisa mengetahui apakah keuangan keluarga dalam kondisi sehat atau tidak. Bahkan dari sebuah pencatatan keuangan, bisa dibuat proyeksi tentang keuangan dalam beberapa tahun ke depan. Terbayang, betapa pentingnya merencanakan keuangan sejak dini.

Secara umum, cara pengelolaan keuangan yang baik dalam keluarga juga banyak sekali ragamnya. Tergantung kepada individu masing-masing. Namun, poin penting selain pemasukan dan pengeluaran reguler sehari-hari yang biasa dimasukkan dalam laporan pencatatan keuangan adalah dana darurat, dana tabungan, dana investasi, dan dana pembayaran utang.

Saat ini, dengan kemajuan teknologi sudah bisa dilakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan menggunakan gawai dalam

genggamannya. Ada banyak versi aplikasi pengelolaan keuangan yang dapat diunduh. Fitur-fitur yang tersedia pun memudahkan melakukan pencatatan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan beberapa aplikasi sudah dilengkapi Akalimitasi (AI) untuk dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal, sesuai kebiasaan pengguna. Jadi semakin sering digunakan, rekomendasi yang diberikan akan lebih baik. Pengelolaan keuangan pribadi dapat dimulai dengan mencatat setiap transaksi yang dilakukan untuk memudahkan pencatatan transaksi digital secara otomatis.

Kemudahan-kemudahan dalam pengelolaan keuangan keluarga semakin lengkap dengan hadirnya Buku Agenda Pengelolaan Keuangan yang diterbitkan OJK untuk membantu proses pencatatan keuangan kita. Dapat diunduh secara gratis di [link](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/NewDetailMateri/549) berikut ini <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/NewDetailMateri/549>



## Pahami Pentingnya Asuransi Jiwa Lewat Film “1 Kakak 7 Ponakan”

Pentingnya asuransi jiwa baru terasa saat hal yang tidak diinginkan sudah terjadi. Lantas seberapa penting asuransi jiwa? Simak ulasannya melalui sebuah film berjudul “1 Kakak 7 Ponakan”.



**A**da banyak hal tak terduga yang bisa terjadi dalam hidup, baik itu hal menyenangkan maupun hal buruk. Untuk menghadapi ketidakpastian ini, asuransi jiwa dibutuhkan sebagai perlindungan diri sendiri atau keluarga bila mengalami gangguan kesehatan karena penyakit, kecelakaan, hingga risiko kematian. Polis asuransi dibutuhkan untuk mengantisipasi kerugian finansial

yang timbul akibat kondisi yang tidak diinginkan tersebut. Kita bisa membeli polis asuransi jiwa agar bisa mendapatkan uang pertanggungan. Singkatnya, sedia payung sebelum hujan.

Agaknya pepatah tersebut tidak diindahkan oleh kebanyakan anak muda saat ini yang sebagian besar hidup sebagai *sandwich generation*. Fenomena ini akhirnya diangkat

ke layar lebar dalam sebuah film bertajuk “1 Kakak 7 Ponakan” yang sudah tayang sejak 23 Januari 2025.

Cerita film 1 Kakak 7 Ponakan merupakan adaptasi dari sinetron tahun 1996 berjudul sama garapan Arswendo Atmowiloto. Mengangkat tema realita generasi *sandwich*, film berdurasi 131 menit ini menampilkan perjuangan seorang anak muda bernama Moko yang diperankan oleh Chicco Kurniawan dalam menghadapi keponakan-keponakannya setelah sebuah peristiwa menyedihkan, memaksanya menjadi kepala keluarga sekaligus ‘orang tua tunggal’.

Moko, sebagai *sandwich generation*, harus mengorbankan banyak hal, mulai dari impiannya melanjutkan kuliah pascasarjana, karier arsitek, hingga kehidupan cintanya bersama Maurin (Amanda Rawles) demi keponakan-keponakannya. Tak hanya Moko, himpitan kehidupan ternyata juga dihadapi keponakan Moko dalam bentuk yang berbeda-beda.

Anggap saja takdir Moko memang demikian. Namun apa yang terjadi dengan Moko masih bisa dihindari apabila sang kakak menyadari pentingnya asuransi jiwa. Meninggalnya sang kakak dan kakak ipar tanpa ada “sesuatu” yang dapat diwariskan untuk anak-anaknya menjadi beban bagi hidup Moko. Sebab sang kakak sebagai pencari nafkah, tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya.

Asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial bagi keluarga jika pencari nafkah meninggal dunia. Uang pertanggungan membantu memenuhi biaya hidup, pendidikan anak, dan melunasi utang (bila ada). Adanya uang pertanggungan menjaga stabilitas keuangan keluarga, memastikan masa depan keluarga terjamin, dan memberikan ketenangan di saat sulit.



Isilah kotak kosong berikut ini dengan jawaban yang benar menggunakan simbol aritmatika dasar

100	:		=	20				
x		X		X				
	+		-	17	=			
=		=		=		+		
300		250	+		-	55	=	
						=		:
	x	35	=		:	91	=	5
		-		-				=
		28		105	+		=	107
		=		=				
			+	350	:	7	=	51



Isilah angka yang kosong dengan jawaban yang tepat dan unggah melalui Instagram Story. Jangan lupa mention @ Sikapiuangmu

Dapatkan hadiah menarik bagi 3 orang pemenang kuis!

# Rangkaian Sejarah Emas

Emas telah lama menjadi komoditas bernilai tinggi dan selalu diminati di berbagai zaman maupun peradaban. Berawal dari ribuan tahun sebelum Masehi, yuk simak rangkaian sejarah emas sejak pertama kali ditemukan hingga menjadi aset berharga kini.



vecteezy

**E**mas telah digunakan sebagai alat tukar dan simbol kekayaan sejak zaman kuno. Awal mula sejarah emas adalah saat logam mulia ini ditemukan pada tambang di Turki, tepatnya di masa kerajaan Lydia. Emas juga kerap ditemui pada mitologi Yunani serta bangsa Inca dan dianggap sebagai barang berharga yang berasal dari langit.

Di awal penemuannya, emas dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat perhiasan serta benda pemujaan pada upacara keagamaan. Penggunaan logam mulia ini sebagai

alat transaksi mulai dipraktekkan di Mesir sekitar tahun 1.500 sebelum Masehi.

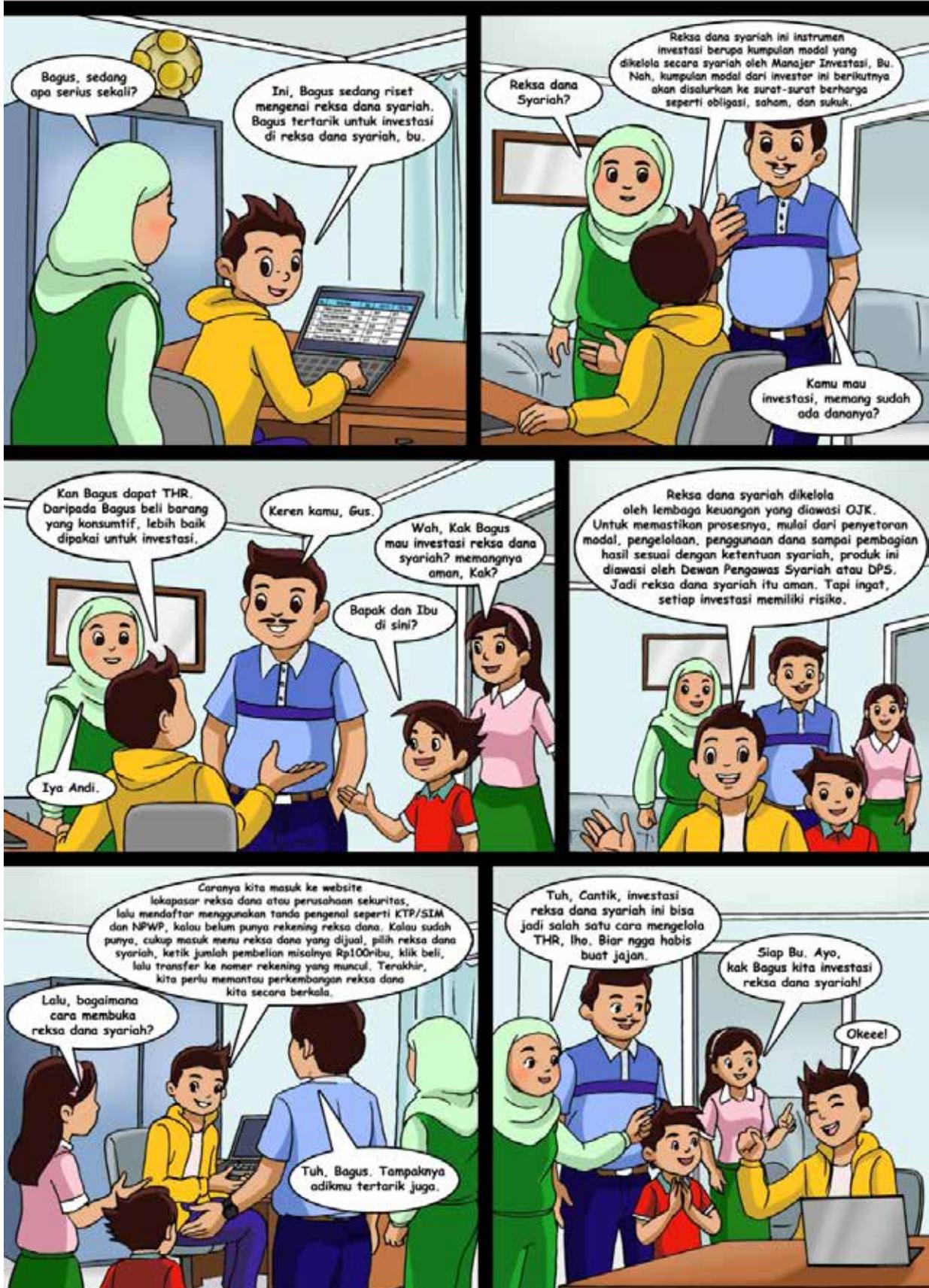
Emas dipandang sebagai penentu status sosial seseorang selama sekian milenium. Dari masa Mesir Kuno hingga hadirnya Departemen Keuangan di negara-negara modern, hanya emas yang punya peran sangat berpengaruh dalam sejarah keuangan. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah investasi emas:

- Zaman Kuno: Bangsa Mesir Kuno dan peradaban Mesopotamia sudah

mengenal emas sebagai lambang kemewahan dan kekuasaan. Emas digunakan untuk membuat perhiasan, artefak, dan sebagai mata uang.

- Zaman Klasik: Bangsa Yunani dan Romawi menganggap emas sebagai mata uang yang stabil. Emas digunakan untuk perdagangan internasional dan disimpan oleh kerajaan sebagai cadangan kekayaan.
- Abad Pertengahan hingga Era Kolonial: Eksplorasi Eropa ke Dunia Baru pada abad ke-15 dan ke-16 didorong oleh keinginan untuk menemukan dan menguasai sumber emas baru. Emas dari Amerika Selatan mengalir ke Eropa, memperkuat ekonomi negara-negara seperti Spanyol dan Portugal.
- Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20: Standar emas (*gold standard*) diperkenalkan, dimana nilai mata uang diikat pada sejumlah emas tertentu. Hal ini memberikan stabilitas ekonomi hingga Perang Dunia I, ketika banyak negara mulai meninggalkan standar emas.
- Abad ke-20 hingga Sekarang: Pasca Perang Dunia II, sistem *Bretton Woods* mencoba mengembalikan stabilitas moneter dengan menggunakan emas sebagai acuan, tetapi akhirnya ditinggalkan pada tahun 1971. Sejak saat itu, emas diperdagangkan bebas di pasar global, menjadi salah satu instrumen investasi yang populer hingga saat ini.

# Momen THR, Yuk, Investasi di Reksa Dana Syariah





Indonesia  
Anti-Scam  
Centre

PUSAT PENANGANAN PENIPUAN TRANSAKSI KEUANGAN

# Apa itu IASC?

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) adalah pusat penanganan penipuan (*scam*) yang menggunakan transaksi di sektor keuangan, dengan metode penanganan yang cepat dan berefek-jera.

IASC merupakan inisiatif OJK bersama seluruh anggota Satgas PASTI yang didukung oleh *stakeholders* antara lain asosiasi industri keuangan, penyedia jasa sistem pembayaran, dan *e-commerce*.

## | Tujuan Pembentukan IASC

Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-penyedia jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran rekening terkait penipuan, melakukan identifikasi para pihak yang terkait penipuan, mengupayakan pengembalian dana korban yang masih tersisa, dan melakukan upaya penindakan hukum.

Dengan adanya IASC ini, diharapkan memudahkan korban untuk melaporkan penipuan yang menimpanya agar dapat ditangani dengan segera dan terkoordinasi.

## | Data dan Informasi yang perlu disampaikan

- 1  Data diri (KTP, SIM)
- 2  Bukti kepemilikan rekening bank
- 3  Kronologi terjadinya penipuan
- 4  Bukti transaksi (contohnya seperti bukti transfer)

Website IASC mudah digunakan menggunakan handphone melalui <http://iasc.ojk.go.id> dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.



Informasi lebih lanjut hubungi Layanan Konsumen OJK Kontak 157

 Telepon: 157

 Whatsapp: 081 157 157 157

Laporan penipuan juga dapat dilaporkan kepada penyedia jasa keuangan untuk kemudian laporan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut melalui IASC.